

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

## **KATA PENGANTAR**

Pada era reformasi birokrasi sebagaimana telah dicanangkan pemerintah, serta dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai dengan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance* maka dipandang perlu adanya rencana kinerja yang akan dilaksanakan di tahun 2016. Rencana kinerja ini dimaksudkan menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kementerian/lembaga (K/L), dan juga dapat digunakan pemerintah sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing K/L.

Buku ini menyajikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2016. Informasi yang ditampilkan meliputi tujuan, sasaran, indikator kinerja serta program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016. Disajikan pula Rencana Anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 ini, pimpinan BPS Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami hargai.

Makassar, Juni 2015  
BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Kepala,

Nursam Salam



## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Rencana Kinerja Tahunan BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 .....	1
Rencana Kinerja Tahunan BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 .....	1



## RENCANA KERJA TAHUNAN BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
<b>T1 Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik</b> Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik				
<b>1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS</b>				<b>15.632,92</b>
1.1.1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	80	<b>06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</b>	<b>15.632,92</b>
1.1.2 Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	53	<b>2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi</b>	<b>15.632,92</b>
1.1.3 Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100	01 Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	115,67
1.1.4 Jumlah release data yang tepat waktu	Aktivitas	28	001 Penyusunan dan Penyempurnaan Klasifikasi, Konsep Definisi dan Ukuran-Ukuran Statistik	0,87
1.1.5 Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	7	002 Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web	112,15
1.1.6 Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	1	003 Updating Peta Desa dan Blok Sensus	2,65
			06 Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus	58,04
			010 Penyusunan Publikasi Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS2015	58,04
			17 Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016	14.956,66



Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
			039 Publisitas SE2016	145,28
			040 Pengembangan Website SE2016 Untuk Penyajian Hasil SE2016 dan Pembangunan Akses Online dan Layanan SE2016	11,00
			041 Listing Usaha/Perusahaan	13.270,99
			042 Penjaminan Kualitas SE2016	611,53
			043 PES SE2016	846,63
			044 Gladi Bersih Pencacahan UMK dan UMB Sensus Ekonomi 2016	71,23
			20 Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup	502,55
			051 Uji Coba SBH2017	502,55
			-----	<b>10.506,19</b>
<b>1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)</b>				
1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	96	<b>06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</b>	<b>10.506,19</b>
1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	Persen	92,3	<b>2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi</b>	<b>10.506,19</b>
1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	85	04 Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	208,86
			007 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran	86,57
			008 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan	112,45
			009 Survei Upah dan Struktur Upah	9,84
			07 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	1.165,14

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
			011 Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi	924,60
			012 SUSENAS Modul Kesehatan dan Perumahan	240,54
			<i>08 Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial</i>	<i>814,69</i>
			013 Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup	798,01
			014 Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)	3,67
			015 Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan (IPB)	4,62
			016 Penyusunan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP)	3,62
			017 Penyusunan Statistik Politik Keamanan	4,77
			<i>11 Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	<i>2.911,07</i>
			018 Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan	1.822,98
			019 Survei Luas Panen dan Luas Lahan Untuk Pengecekan Keakurasian Data Produksi Padi, Jagung dan Kedelai	1.027,22
			020 Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian	24,89
			022 Survei Perusahaan Perkebunan	19,57
			023 Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga	16,41
			<i>12 Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan</i>	<i>39,89</i>
			024 Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH	22,28
			025 Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP	10,80
			026 Survei Perusahaan Kehutanan	6,81
			<i>13 Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Pengalihan, Energi, dan Konstruksi</i>	<i>830,34</i>
			027 Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan	174,91
			028 Survei Industri Besar/Sedang Tahunan	44,83

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
			029 Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan	473,09
			030 Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori	77,11
			031 Survei Konstruksi	60,40
			<i>14 Publikasi/Laporan Statistik Distribusi</i>	<i>117,73</i>
			032 Pembuatan Database Eksportir dan Pembeli Luar Negeri	0,87
			033 Survei Impor Daerah Perbatasan	0,87
			034 Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi	38,19
			035 Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi	53,37
			036 Survei Waktu Tunggu (Dwelling Time) di Pelabuhan	6,88
			037 Kompilasi Data Transportasi	8,28
			038 Survei Angkutan Penumpang dan Barang di Terminal dan Jembatan Timbang	9,27
			<i>15 Publikasi/Laporan Penyusunan Statistik Perdagangan Antar Wilayah Komoditi Tertentu</i>	<i>14,73</i>
			078 Studi Inventarisasi Sumber Informasi Dalam Rangka Penyusunan Statistik Perdagangan Antar Wilayah	14,73
			<i>16 Publikasi/Laporan Updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan</i>	<i>205,77</i>
			079 Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan	205,77
			<i>18 Publikasi/Laporan Statistik Harga</i>	<i>1.544,69</i>
			045 Survei Statistik Harga Produsen	346,46
			046 Indeks Kemahalan Konstruksi	140,71
			047 Survei Harga Perdagangan Besar	310,31

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
			048 Survei Penyusunan Diagram Timbang IHPB Provinsi	136,80
			049 Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras	282,36
			050 Survei Harga Perdesaan	328,05
			21 <i>Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata</i>	736,15
			053 Statistik Lembaga Keuangan	36,10
			054 Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal	11,64
			055 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	55,43
			056 Survei Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	14,08
			057 Survei Perusahaan Informasi dan Komunikasi	22,10
			058 Penyusunan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Development Index)	2,28
			059 Survei IPTEK dan Inovasi	8,69
			060 Survei Bidang Jasa Pariwisata	41,82
			061 Survei Konsumsi Bahan Pokok	543,14
			062 Survei Pelintas Batas Penduduk Asing Pemegang KITAS	0,87
			22 <i>Publikasi/Laporan Neraca Produksi</i>	1.435,91
			063 Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan 2010=100 (SKTNP Barang)	17,06
			064 Implementasi SEEA Dalam Sisnerling Indonesia	0,87
			065 Penyusunan PDB Sektor Informal Menurut Lapangan Usaha	1.115,22
			066 Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010=100 (SKTNP Jasa)	9,59
			067 Penyusunan Matriks Trade And Transport Margin (TTM) Berbasis SNA 2008	11,31
			068 Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100	277,99

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
<b>T2 Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik</b> Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	84	069 Penyusunan Matriks Supply Regional	3,87
			23 <i>Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran</i>	451,28
			070 Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses	1,64
			071 Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba (FSA)	15,87
			072 Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha (FSA)	15,30
			073 Penyusunan Komponen Pengeluaran Pemerintah Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses	5,40
			074 Penyusunan Komponen PMTB dan Inventori Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses	13,35
			075 Penyusunan Matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah	54,78
			076 Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan	344,94
			24 <i>Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik</i>	29,94
077 Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen	29,94			

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
<b>2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)</b>				<b>2.107,09</b>
2.1.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	6.400	<b>02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS</b>	<b>1.815,00</b>
2.1.2. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	85	<b>2891 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi</b>	<b>1.815,00</b>
2.1.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	82	<i>01 Kendaraan Bermotor</i>	<i>1450,00</i>
			001 Pengadaan Kendaraan Roda 4 atau Lebih	250,00
			002 Pengadaan Kendaraan Roda 2 atau 3	1.200,00
			<i>02 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</i>	<i>356,00</i>
			003 Pengadaan Perangkat Teknologi dan Informasi	294,00
			004 Pengadaan Peralatan Komunikasi	62,00
			<i>03 Peralatan dan Fasilitas</i>	<i>9,00</i>
			005 Pengadaan Sarana Perkantoran	9,00
			006 Pengadaan Peralatan Cetak	
			007 Pengadaan Meubelair	
			008 Pengadaan Peralatan	
			<i>04 Gedung dan Bangunan</i>	
			014 Rehabilitasi dan Penambahan Nilai Bangunan Gedung Kantor	
			015 Penambahan Nilai Bangunan Gedung Rumah Dinas	

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
			<b>06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</b>	<b>292,09</b>
			<b>2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi</b>	<b>292,09</b>
			02 Laporan Diseminasi Statistik	195,48
			005 Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi	114,10
			006 Peningkatan Pelayanan (PNBP)	81,38
			03 Laporan Metadata Statistik	96,61
			004 Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus	96,61
<b>Tujuan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel</b>				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	65		
<b>3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS</b>				<b>11.258,93</b>
3.1.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	18	<b>01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS</b>	<b>11.258,93</b>
3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	60,2	<b>2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi</b>	<b>11.258,93</b>
			01 Layanan Perkantoran	11.258,93
			001 Belanja Pegawai	8.628,17
			002 Belanja Barang Operasional	2.625,24
			102 Penyusunan SHBJ	5,52
<b>3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</b>				<b>225,09</b>
3.2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	65	<b>01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS</b>	<b>255,09</b>

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
			<b>2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi</b> 01 Layanan Perkantoran 177 Penyelenggaraan Pembinaan SAKIP	<b>255,09</b> 255,09 255,09
<b>Total</b>				<b>39.730,22</b>



**Maksud, Tujuan, dan Penerima Manfaat (Eksternal BPS) dari Rencana Kegiatan/Aktivitas Teknis Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan yang akan Diselenggarakan pada Tahun 2016**

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>2900 PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI</b>  <b>- PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI, KONSEP DEFINISI DAN UKURAN-UKURAN STATISTIK</b>                      Menyempurnakan Klasifikasi, Konsep Definisi Dan Ukuran-Ukuran Statistik agar tercipta keseragaman interpretasi bagi petugas pengumpul, pengolah, penyaji data dan bagi para analis serta pengguna data lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai bahan acuan dalam penentuan perubahan kriteria urban/rural.</li> <li>- Untuk menyediakan klasifikasi pengeluaran rumah tangga yang berkesinambungan yang dapat digunakan di semua survei.</li> <li>- Untuk menyediakan paket program pencarian kode klasifikasi guna mempermudah pengguna publikasi klasifikasi.</li> <li>- Untuk menyediakan basis data lapangan usaha guna memperkaya informasi jenis lapangan usaha yang dapat ditambahkan dalam SPK.</li> <li>- Untuk lebih mengenalkan jenis jenis klasifikasi yang ada, dan peningkatan pemahaman mengenai klasifikasi kepada pengguna klasifikasi, baik internal maupun eksternal BPS.</li> </ul>	<p>Kementerian/Lembaga/Badan/Dinas di Pusat dan Daerah; Pelaku usaha, peneliti, dan pengguna lainnya.</p>
<p><b>- PENYUSUNAN INTEGRATED BUSINESS REGISTER (IBR)</b>                      Mengintegrasikan berbagai sumber basis data ekonomi IBR baik dari sumber internal maupun eksternal sebagai infrastruktur penyediaan kerangka induk sektor institusi korporasi dan LNPRT khususnya digunakan dalam pelaksanaan sensus/survei BPS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya basis data yang up to date untuk penyusunan kerangka induk sensus/survei khususnya sektor <u>institusi</u> korporasi dan LNPRT.</li> <li>- Penyusunan klasifikasi baku unit institusi sebagai lanjutan dari penyusunan konsep definisi unit statistik.</li> <li>- Identifikasi cakupan dan implementasi pengklasifikasian unit institusi LNPRT pada tingkat propinsi melalui capacity building model statistik ekonomi.</li> <li>- Sinergi dan koordinasi data yang baik yang melibatkan stakeholder internal subject matter BPS dan eksternal lembaga administratif.</li> <li>- Pemanfaatan basis data IBR untuk berbagai pengguna internal dan eksternal BPS.</li> </ul>	<p>Kementerian/Lembaga/Badan/Dinas di Pusat dan Daerah; Pelaku usaha, peneliti, dan pengguna lainnya; Perusahaan, asosiasi, organisasi profesi</p>
<p><b>- UPDATING PETA DESA DAN BLOK SENSUS</b>                      Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan master area frame wilayah kerja statistik. Wilayah kerja statistik terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan blok sensus.</p>	<p>Terciptanya peta desa/kelurahan dan blok sensus serta peta digital yang mutakhir</p>	<p>Masyarakat luas pengguna data BPS</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>2897 PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN DISEMINASI INFORMASI STATISTIK</b>  <b>- PENINGKATAN PELAYANAN METADATA KEGIATAN STATISTIK DASAR, SEKTORAL DAN KHUSUS</b>  Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem rujukan statistik sangat perlu dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan UU no 16 tahun 1997.</p>	<p>a. Tercapainya mutu sumber daya manusia yang siap mengantisipasi perkembangan informasi terkini  b. Terselenggaranya sistem administrasi yang baik guna menunjang kegiatan rujukan statistik  c. Tersusun dan tersebarluaskannya piranti lunak aplikasi di tempat strategis sehingga dapat bermanfaat bagi instansi terkait  d. Terbentuknya dasar-dasar panduan rekomendasi kegiatan statistik</p>	<p>Kementrian/Lembaga Pemerintah dalam hal konsultasi dan rekomendasi Kegiatan Statistik; SKPD  Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal konsultasi dan rekomendasi kegiatan statistik; Swasta</p>
<p><b>- PENINGKATAN KUALITAS DAN LAYANAN PUBLIKASI</b>  Memberikan pelayanan internal kepada subject matter produsen publikasi(penomoran publikasi, cover, sistem mailing list, SPRP, dan katalog)memberikan pelayanan internal kepada unit-unit kerja yang melakukan pelayanan langsung ke konsumen data, yaitu subdit perpustakaan dan dokumentasi statistik dan subdit layanan dan promosi statistik (sistem informasi publikasi, program entri publikasi) memberikan pelayanan kepada konsumen data (penyusunan berbagai publikasi, program ARC, infografis, DDA yang semakin berkualitas, sosialisasi perka publikasi, BRS yang efektif)</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan layanan publikasi</p>	<p>Instansi pemerintah,  Para eksekutif,  Masyarakat yang menerima publikasi melalui mailinglist publikasi;  Seluruh masyarakat dunia dengan tersedianya berbagai publikasi BPS di public domain (website BPS).</p>
<p><b>- PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN DOKUMENTASI KOLEKSI DAN LAYANAN DATA</b>  1. Terbentuknya basis data perpustakaan sebagai pendukung layanan informasi publik  2. Terciptanya sistem pendukung layanan informasi yang berbasis teknologi dan internet  3. Terkelolanya database perpustakaan dengan baik  4. Tersusunnya komposisi ideal pada struktur pelayanan pada unit pelayanan publik  5. Membentuk sebuah indikator kinerja perpustakaan/ Library Performance Indicators yang berguna dalam menentukan batasan kinerja sebuah perpustakaan baik di BPS Pusat maupun BPS Provinsi, serta BPS Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Terciptanya standar pelayanan informasi terhadap pengguna data statistik yang berkesinambungan  2. Terbentuknya standar Sistem Pelayanan Terpadu  3. Terciptanya evaluasi Standar Pelayanan Perpustakaan secara rutin per tahun  4. Terciptanya sistem pelayanan informasi yang profesional di BPS  5. Terciptanya sistem pelayanan informasi yang sesuai dengan tuntutan pengguna dan tuntutan perkembangan zaman  6. Terciptanya dukungan sistem layanan informasi statistik yang cepat, mudah murah dan up to date  7. Terbangunnya model interoperabilitas aplikasi digital library yang dapat berinteraksi dengan sistem lain untuk masa kini dan mendatang  8. Terbangunnya sistem literasi yang handal dalam kegiatan pelayanan informasi publik di BPS Pusat maupun BPS Provinsi, serta BPS Kabupaten/Kota</p>	<p>Masyarakat luas pengguna data BPS</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENINGKATAN PELAYANAN (PNBP)</b> Mendorong perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melengkapi koleksi perpustakaan dalam format digital.</p>	<p>a. Tercapainya mutu sumber daya manusia yang siap mengantisipasi perkembangan informasi terkini b. Terselenggaranya sistem administrasi yang baik guna menunjang kegiatan rujukan statistik c. Tersosialisasikannya aplikasi SIRuSa sehingga dapat bermanfaat bagi instansi terkait d. Terbentuknya dasar-dasar panduan rekomendasi kegiatan statistik</p>	<p>1. Eksternal BPS; 2. Pengguna data BPS; 3. Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam hal konsultasi dan rekomendasi Kegiatan Statistik; 4. SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal konsultasi dan rekomendasi kegiatan survei statistik sektoral; 5. Pihak Swasta, Peneliti, dan Perorangan dalam hal konsultasi kegiatan statistik</p>
<p><b>2901 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI STATISTIK</b></p>		
<p><b>- INTEGRASI PENGOLAHAN DATA TERPADU</b> Untuk memberikan sistem pengolahan data terpadu sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan tepat waktu.</p>	<p>1) Meningkatkan kualitas program pengolahan data yang berkelanjutan 2) Meningkatkan kualitas data statistik 3) Meningkatkan ketepatan waktu pengolahan data dengan adanya ragam model pengolahan data sesuai kebutuhan 4) Mewujudkan metadata statistik yang baik sebagai penunjang penyajian data statistik.</p>	<p>Masyarakat umum pengguna data BPS</p>
<p><b>- PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN</b></p>		
<p>1) Meningkatkan layanan koneksi Intranet/VPN 2) Meningkatkan layanan koneksi Internet 3) Meningkatkan layanan koneksi Ekstranet 4) Merawat infrastruktur data center dan pendukungnya</p>		<p>Secara umum layanan jaringan komunikasi data dan akses online beroperasi selama 24 jam selama 7 hari yang dapat digunakan oleh masyarakat umum baik dalam maupun luar negeri.; akses online yang dapat digunakan oleh pengguna di luar BPS dengan menggunakan koneksi ekstranet adalah: Aplikasi pertukaran data antara BPS dan unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4). Aplikasi pertukaran data antara BPS, Bank Indonesia, Bea cukai dan Pajak. Aplikasi pertukaran data antara BPS dan Badan Informasi Geografi (BIG); Layanan jaringan komunikasi data dan akses online yang dapat digunakan oleh pengguna di luar BPS dengan menggunakan koneksi internet adalah: Website bps.go.id dan kantor BPS daerah. Website lpse.bps.go.id</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENGEMBANGAN LAYANAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA DAN AKSES ONLINE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengembangkan Infrastruktur Data Center BPS</li> <li>2) Meremajakan dan meningkatkan kapasitas LAN BPS</li> <li>3) Meremajakan dan meningkatkan kapasitas server, storage, dan perangkat jaringan Data Center</li> <li>4) Mengadakan peralatan sistem back up DC</li> <li>5) Mengadakan server, storage, dan perangkat jaringan Data Recovery Center</li> </ol>		<p>Secara umum layanan jaringan komunikasi data dan akses online beroperasi selama 24 jam selama 7 hari yang dapat digunakan oleh, masyarakat umum baik dalam maupun luar negeri,; Layanan jaringan komunikasi data dan akses online yang dapat digunakan oleh pengguna di luar BPS dengan menggunakan koneksi ekstranet adalah: Aplikasi pertukaran data antara BPS dan unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4). Aplikasi pertukaran data antara BPS, Bank Indonesia, Bea cukai dan Pajak. Aplikasi pertukaran data antara BPS dan Badan Informasi Geografi (BIG); Layanan jaringan komunikasi data dan akses online yang dapat digunakan oleh pengguna di luar BPS dengan menggunakan koneksi internet adalah: Website bps.go.id dan kantor BPS daerah. Website lpse.bps.go.id</p>
<p><b>- PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN REKAYASA INFORMATIKA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kualitas sistem informasi.</li> <li>2) Meningkatkan kualitas SDM.</li> <li>3) Menyediakan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>4) Melakukan penyusunan spesifikasi dan kebutuhan untuk keperluan pengadaan komputer dan alat penunjang lainnya.</li> <li>5) Melakukan perawatan computer, notebook, printer dan alat pendukung lainnya.</li> <li>6) Menyusun repository data dan meta data supaya mudah diakses oleh pengguna.</li> <li>7) Melakukan pelayanan lainnya terkait dalam bidang TI</li> <li>8) Mempermudah pengelolaan jabatan fungsional pranata komputer</li> <li>9) Meningkatkan ketersediaan data warehouse uang mudah diakses</li> <li>10) Melindungi Komputer dan Notebook dari virus yang merugikan</li> <li>11) Meningkatkan fasilitas untuk pengelolaan informasi manajemen sesuai dengan peningkatan kebutuhan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) mendapatkan SDM yang berkualitas</li> <li>2) memperoleh Perangkat lunak (Software) yang sesuai kebutuhan</li> <li>3) melaksanakan Layanan yang prima terutama dalam perawatan komputer dan alat penunjang lainnya .Pengelolaan data yang profesional</li> <li>4) menghasilkan Sistem repository data dan software yang mudah diakses.</li> <li>5) memperoleh sistem Program entry data atau proses scanning yang 'user friendly'</li> <li>6) memperoleh hasil Penilaian usulan angka kredit Pejabat Fungsional dan tim penilai dapat dipermudah laporannya</li> <li>7) menyediakan Teknologi data warehouse dan business intelligence yang mencakup data-data penting BPS yang dapat digunakan oleh User, baik</li> <li>8) Meningkatkan fasilitas untuk pengelolaan informasi manajemen sesuai dengan peningkatan kebutuhan</li> </ol>	<p>Pelajar/Mahasiswa, Dunia usaha, Pendidikan Pengambil kebijakan dan lain-lain</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>2905 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN</b>  <b>- PENGHITUNGAN PENDUDUK DAN RUMAH TANGGA UNTUK PENIMBANG SURVEI KEPENDUDUKAN</b>  Melakukan estimasi jumlah penduduk dan rumah tangga menurut kabupaten/kota untuk digunakan sebagai penimbang survei Kependudukan (Susenas dan Sakernas) dan Dana Alokasi Umum(DAU)</p>	<p>Tersedianya jumlah penduduk dan rumah tangga menurut Kabupaten/kota per triwulan</p>	<p>1. Kantor Pajak; 2. Dinas Tenaga Kerja</p>
<p><b>- PENYUSUNAN PUBLIKASI PROFIL PENDUDUK INDONESIA HASIL SUPAS2015</b>  Menganalisis karakteristik demografi, sosial dan ekonomi penduduk Indonesia</p>	<p>Tersedianya informasi terkait karakteristik demografi, sosial dan ekonomi penduduk Indonesia</p>	<p>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah; 4. Dinas Ketenagakerjaan; 5. Kanwil Depag; 6. Dinas Sosial; 7. BKKBN; 8. Pengguna Statistik Kependudukan</p>
<p><b>- PENYUSUNAN PARAMETER DEMOGRAFI</b></p>	<p>Untuk memperoleh gambaran ukuran demografi yang berguna untuk melihat keberhasilan program pemerintah yang telah dilaksanakan dan perencanaan di masa mendatang</p>	<p>Bappeda; Dinkes; Dikbud; Disnaker; kanwil Depag; Pemda Prov dan Kab/Kota; Kanwil Depsos; Pengguna Statistik Kependudukan</p>
<p><b>- SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) SEMESTERAN</b></p>	<p>Menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap semester. Memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.</p>	<p>1. Kementerian/Lembaga; 2. ILO; 3. Akademisi; 4. Organisasi Swasta; 5. Masyarakat umum</p>
<p><b>- SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) TAHUNAN</b></p>	<p>Menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap tahun. Memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat provinsi maupun nasional.</p>	<p>1. Kementerian/Lembaga; 2. ILO; 3. Akademisi; 4. Organisasi Swasta; 5. Masyarakat umum</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI UPAH DAN STRUKTUR UPAH</b></p>	<p>Surveu Upah:            1) Untuk mendapatkan informasi/data statistik upah buruh di bawah pengawas/mandor yang berkesinambungan, secermat dan sedini mungkin,            2) Untuk memperoleh gambaran taraf kesejahteraan masyarakat pada umumnya,            3) Untuk penyempurnaan kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan, pengendalian, dan analisis upah pekerja/karyawan di tingkat nasional dan regional.</p> <p>Survei Struktur Upah (SSU):            Untuk mendapatkan informasi/data statistik upah yang lebih rinci antara lain, upah per jenis jabatan/pekerjaan dan jenis kelamin, untuk karyawan non-produksi/non-pelaksana, karyawan produksi/pelaksana di bawah pengawas/mandor/supervisor, dan karyawan produksi/pelaksana pada tingkat pengawas/mandor/supervisor ke atas.            Data hasil SSU yang dikumpulkan secara berkala diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat untuk memantau perkembangan upah per jenis jabatan dan jenis kelamin di Indonesia, dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan kebijakan ketenagakerjaan dan pengupahan di tingkat nasional.</p>	<p>Ketua Bappeda;            Barenbang, Dinas Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi;            Dir. Jaminan Sosial, Pengupahan dan Kesejahteraan, Kemenakertrans;            International Monetary Fund (IMF) C/O Bank Indonesia;            Lembaga Penelitian SMERU;            Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);            Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);            Dir. Lembaga Demografi Fak. Ekonomi Univ. Indonesia;            L P E M Universitas Indonesia;            Dewan Pengupahan, Disnakertrans;            Sudir. Analisis Inf. Pengupahan &amp; Jamsos, Ditjen PHI &amp; Jamsos, Disnakertrans;            Sudir. Program, Evaluasi dan Pelaporan, Ditjen PHI &amp; Jamsos, Disnakertrans;;            Puslitbang Ketenagakerjaan- Balitfo, Disnakertrans;;            Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Disnakertrans;;            Bank Indonesia</p>
<p><b>- PENYUSUNAN PUBLIKASI PROFIL MIGRAN HASIL SUSENAS</b></p> <p>(1) Untuk memberikan gambaran mengenai pola dan arus migrasi antar provinsi di Indonesia            (2) Untuk memberikan gambaran mengenai profil migran dilihat dari berbagai karakteristik.</p>	<p>Untuk memberikan informasi mengenai migrasi secara berkesinambungan setiap tahun.</p>	<p>Masyarakat atau mahasiswa (yang membutuhkan informasi mengenai statistik migrasi);            Peneliti mengenai migrasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIP);            Peneliti mengenai migrasi di Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI);            Pembuat kebijakan dan perencanaan pembangunan yang terkait dengan masalah migrasi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);            Pengambil keputusan dan kebijakan yang terkait dengan masalah migrasi di DPRD;;            Pusat Pelayanan Informasi Perpustakaan Daerah, PERPUSDA;            ARSIP Daerah</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYUSUNAN PUBLIKASI STATISTIK MIGRASI INDONESIA DAN PER PROVINSI (33 PROVINSI) HASIL SUPAS</b>            Untuk menyajikan secara lengkap besaran dan arus migrasi internal secara nasional dan masing-masing provinsi. Selain itu juga menyajikan karakteristik dari pelaku migrasi.</p>	<p>Untuk menjembatani kelangkaan penyajian data migrasi. Lebih jauh lagi, dapat membantu menjawab permasalahan kependudukan seperti komposisi penduduk, disparitas penduduk, dan kepadatan penduduk, serta dapat dipakai untuk menyusun kebijakan kependudukan di Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat atau mahasiswa (yang membutuhkan informasi mengenai statistik migrasi),</li> <li>2. Peneliti mengenai migrasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),</li> <li>3. Peneliti mengenai migrasi di Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI),</li> <li>4. Pembuat kebijakan dan perencanaan pembangunan yang terkait dengan masalah migrasi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),</li> <li>5. Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil),</li> <li>6. Pengambil keputusan dan kebijakan yang terkait dengan masalah migrasi di DPRD,</li> <li>7. Pusat Pelayanan Informasi Perpustakaan Daerah, PERPUSDA,</li> <li>8. ARSIP Nasional</li> </ol>
<p><b>2906 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT</b></p>		
<p><b>- SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KOR DAN KONSUMSI</b>            Memenuhi kebutuhan pemerintah, khususnya untuk penyediaan data tingkat kemiskinan dalam interval waktu yang lebih pendek (dari sebelumnya sekali setahun menjadi dua kali setahun).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan data kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kemiskinan, perjalanan &amp; kriminalitas, dan perlindungan sosial.</li> <li>2. Mengumpulkan data konsumsi dan perjalanan.</li> <li>3. Mengumpulkan data perlindungan sosial.</li> </ol>	<p>pemerintah pusat dan daerah;            organisasi swasta;            akademisi;            lembaga penelitian;            masyarakat luas</p>
<p><b>- SUSENAS PANEL</b>            Agar data sosial ekonomi sedapat mungkin sejalan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan. Data yang dihasilkan pada Susenas Modul Konsumsi tidak dapat melihat pola konsumsi dan pola pergeseran miskin hampir miskin pada rumah tangga dari Bulan Maret 2012 ke Bulan Maret 2015, pola konsumsi dan pergeseran tersebut hanya dapat dilihat dengan menggunakan data Susenas Panel. Pola konsumsi rumah tangga yang dihasilkan dari data Susenas Panel selalu untuk melihat pergeseran penduduk miskin-hampir miskin juga sangat berguna untuk keperluan penghitungan PDB.</p>	<p>Membuat laporan final untuk kegiatan pengumpulan data yang sudah dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah;</li> <li>2. Swasta;</li> <li>3. Lembaga Internasional;</li> <li>4. Akademisi</li> </ol>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA DAN STATISTIK PEMUDA</b> Memberikan gambaran rinci dan menyeluruh mengenai kuantitas, kualitas dan tingkat kesejahteraan sosial penduduk lanjut usia dan pemuda di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun provinsi.</p>	<p>Menyajikan penduduk lanjut usia dan pemuda dari sisi demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan program pemberdayaan pemuda.</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/BAPPEDA; Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah; Dinas Sosial; Dinas Ketenagakerjaan; Dinas Kesehatan; BKKBN; Komnas Lansia;</p>
<p><b>- STATISTIK PENDIDIKAN</b> Untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun tingkat provinsi kepada pengguna data baik itu pembuat kebijakan, pemerhati dunia pendidikan dan lain-lain.</p>	<p>Untuk menyajikan data dan informasi dunia pendidikan yang sangat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitor dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan, sosial dan budaya.</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/BAPPEDA; Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Dinas Sosial; Kementerian Agama; Dinas Ketenagakerjaan;</p>
<p><b>- PROFIL KESEHATAN IBU DAN ANAK</b> Publikasi yang berisi gambaran tentang kesehatan ibu dan anak di Indonesia.</p>	<p>Memberikan gambaran secara rinci mengenai kesehatan ibu, kesehatan anak, perilaku hidup sehat dan gambaran kondisi sosial ekonomi rumah tangga di Indonesia.</p>	<p>Dinas Kesehatan; Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat; Kemeng PPN (Bappeda); Akademisi; Peneliti Bidang Kesehatan</p>



Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- INDIKATOR PERUMAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN</b> Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2015 merupakan publikasi rutin yang terbit dua tahun sekali guna menyediakan data mengenai perumahan dan lingkungan yang berkelanjutan.</p>	<p>Menyajikan gambaran kondisi perumahan dan kesehatan lingkungan pada tingkat nasional dan provinsi. Di samping itu, pada publikasi ini juga disajikan beberapa data sektor untuk melengkapi analisisnya.</p>	<p>Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kemendagri (Bappeda); Dinas Koordinator Kesejahteraan Rakyat; Akademisi; Peneliti Bidang Lingkungan;</p>
<p><b>- SUSENAS MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN</b> Menyediakan data mengenai kesehatan dan perumahan yang lebih rinci.</p>	<p>Pengumpulan data indikator sosial ekonomi dengan menitikberatkan kepada sasaran rumah tangga, yaitu: a. Data kor, mencakup keterangan demografi dan keterangan pokok tentang pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, fertilitas, perumahan, dan pengeluaran. b. Data kesehatan dan perumahan mencakup keterangan mengenai kesehatan masyarakat secara umum yang meliputi status kesehatan, perilaku hidup sehat, pelayanan kesehatan, biaya kesehatan, kesehatan ibu dan anak, kondisi rumah, sanitasi lingkungan dan sumber air bersih.</p>	<p>Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kemendagri (Bappeda); Peneliti Bidang Kesehatan; Peneliti Bidang Perumahan dan Lingkungan; Akademisi;</p>
<p><b>2907 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL</b></p>		
<p><b>- PENYUSUNAN STATISTIK MODAL SOSIAL</b> Memberikan informasi besaran modal sosial dalam masyarakat Indonesia dalam tiga kelompok indikator, yaitu sikap percaya dan toleransi, keanggotaan dalam perkumpulan dan jejaring lokal, serta aksi bersama. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan perspektif tentang pentingnya modal sosial dalam pembangunan.</p>	<p>Menyajikan data dan informasi terkait kondisi modal sosial masyarakat Indonesia menurut provinsi. Serta 1). Menyediakan data dan informasi terkait sikap percaya dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku, keanggotaan dalam kelompok/organisasi dan jejaring lokal serta aksi bersama dalam kehidupan masyarakat, 2). Menyediakan data dan informasi terkait indeks komposit modal sosial menurut provinsi, 3). Memberikan gambaran umum mengenai hubungan modal sosial dan kemajuan pembangunan suatu wilayah.</p>	<p>Instansi pemerintah (dinas dan SKPD); Kalangan dunia usaha; Kalangan akademisi; Kalangan peneliti; Masyarakat luas</p>
<p><b>- PENYUSUNAN STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (SLHI)</b> Menyajikan informasi dan data yang dapat memberikan gambaran kondisi lingkungan yang dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu</p>	<p>1. Menghimpun data statistik lingkungan 2. Mengidentifikasi permasalahan data lingkungan 3. Memberikan gambaran perbandingan data lingkungan antar wilayah</p>	<p>1. Instansi Pemerintah Daerah (Dinas/SKPD); 2. Para pembuat kebijakan; 3. Akademisi dan peneliti; 4. Masyarakat umum</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN HIDUP</b> Secara umum maksud Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH) adalah untuk mengetahui keterkaitan antara aktivitas manusia terhadap permasalahan lingkungan dan perubahan iklim.</p>	<p>1. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada perubahan iklim pada lingkungan rumah tangga. 2. Menyajikan indikator perilaku peduli lingkungan hidup.</p>	<p>1. Instansi Pemerintah Daerah (Dinas/SKPD); 2. Para pembuat kebijakan; 3. Akademisi dan peneliti; 4. Masyarakat umum; 5. Pihak swasta</p>
<p><b>- PENYUSUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (IPB)</b> Memberikan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kondisi terakhir capaian indikator-indikator dalam pembangunan berkelanjutan.</p>	<p>Menyajikan data dan informasi mengenai indikator-indikator pembangunan berkelanjutan 2. Memberikan gambaran perbandingan capaian indikator-indikator pembangunan berkelanjutan antar daerah.</p>	<p>1. Instansi Pemerintah Daerah (Dinas/SKPD); 2. Para Pembuat Kebijakan; 3. Akademisi dan peneliti; 4. Masyarakat Umum</p>
<p><b>- PENYUSUNAN STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR (SDLP)</b> Memberikan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kondisi terakhir capaian data-data dalam pembangunan sumber daya laut dan pesisir.</p>	<p>Secara umum: Untuk menyajikan data dan informasi tentang laut dan pesisir di Indonesia sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan, mengevaluasi dan menentukan program terkait laut dan pesisir. Publikasi ini juga dimaksudkan sebagai sumber data dan informasi bagi masyarakat luas. Secara khusus: untuk menyajikan isu terkait laut dan pesisir, kondisi fisik, sumber daya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, jasa kelautan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat pesisir.</p>	<p>1. Instansi Pemerintah Daerah (Dinas/SKPD); 2. Para Pembuat Kebijakan; 3. Akademisi dan peneliti; 4. Masyarakat Umum</p>
<p><b>- PENYUSUNAN STATISTIK POLITIK KEAMANAN</b> Menyajikan data yang dapat memberikan gambaran situasi politik dan keamanan yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah provinsi</p>	<p>Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu, dan Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.</p>	<p>pelajar dan mahasiswa; akademisi; Dinas dan lembaga pemerintah daerah; masyarakat umum</p>
<p><b>- SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI (PNBP BAPPENAS)</b> Memperoleh gambaran secara lengkap mengenai situasi dan kondisi anti korupsi masyarakat terkini dilihat dari pendapat, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi di Indonesia.</p>	<p>Mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia. Survei ini juga mengukur sejauhmana budaya zero tolerance terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima STRANAS PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi</p>	<p>pelajar dan mahasiswa; akademisi; Dinas dan lembaga pemerintah daerah; masyarakat umum</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- DATA DAN PENGHITUNGAN TINGKAT KEMISKINAN</b> Informasi mengenai penduduk miskin baik pada tingkat nasional, propinsi, maupun Kabupaten/kota saat ini telah menjadi perhatian baik pemerintah maupun kalangan di luar pemerintah. Informasi ini sangat diperlukan khususnya dalam perencanaan pembangunan dan alokasi bantuan kepada penduduk miskin baik oleh pihak pemerintah, swasta maupun lembaga donor internasional. Untuk itu data dan informasi kemiskinan yang lengkap, akurat serta up to date mutlak diperlukan. Disamping tersedianya data makro yang akurat, ketersediaan profil kemiskinan menjadi sangat penting agar kebijakan program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2015, baik pada tingkat nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota yang didasarkan pada penghitungan data Susenas 2015.</li> <li>2. Menghitung Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tingkat nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota yang didasarkan pada data Susenas 2014 dan Susenas 2015.</li> <li>3. Menyusun penghitungan tingkat kemiskinan tahun 2015 yang didasarkan pada data Susenas 2015.</li> </ol>	<p>Dinas Sosial; Bappeda; Perguruan tinggi;</p>
<b>2910 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN</b>		
<p><b>- SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN</b> Tersedianya data produksi tanaman pangan dan data pendukung/data terkait seperti luas baku lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah, banyaknya alat/mesin pertanian, dan data perbenihan.</p>	<p>Mendapatkan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas tanam, panen, serta luas puso tanaman pangan</li> <li>b. Produktivitas (rata-rata hasil per hektar) tanaman pangan</li> <li>c. Luas baku lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah</li> <li>d. Banyaknya alat/mesin pertanian (Alsintan)</li> <li>e. Keterangan tentang perbenihan</li> </ol>	<p>Dinas Pertanian (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian/Pusdatin, dan Badan Litbang); Dinas Perdagangan; Badan Ketahanan Pangan (BKP); Bulog; BAPPEDA; Kanwil Keuangan; Lembaga penelitian pemerintah daerah dan swasta</p>
<p><b>- SURVEI LUAS PANEN DAN LUAS LAHAN UNTUK PENGECEKAN KEAKURASIAN DATA PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI</b> Tersedianya data luas panen dan luas lahan untuk pengecekan keakurasian data produksi padi, jagung dan kedelai dengan pendekatan rumah tangga di 7 provinsi sebagai pembandingan dengan existing dengan pendekatan area.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan data pembandingan luas panen dan luas lahan sehingga diperoleh angka konversi terhadap data existing</li> <li>b. Mendapatkan keterangan tentang luas tanam dan luas panen</li> <li>c. Mendapatkan informasi luas lahan sawah berdasarkan metode wawancara dan pengukuran di lapangan</li> <li>d. Mendapatkan angka konversi galengan</li> <li>e. Mendapatkan informasi pendukung terkait kegiatan usaha</li> </ol>	<p>Dinas Pertanian (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian/Pusdatin, dan Badan Litbang); Badan Ketahanan Pangan (BKP); Lembaga penelitian pemerintah daerah dan swasta</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI HORTIKULTURA DAN INDIKATOR PERTANIAN</b> Tersedianya data luas panen/tanaman menghasilkan dan produksi tanaman sayuran, buah-buahan, obat-obatan/ biofarmaka, dan tanaman hias dan data pendukung/data terkait lainnya</p>	<p>Mendapatkan data yang akurat mengenai luas panen, produksi, tanaman rusak, tanaman baru, harga dan produktivitas dari tanaman sayuran, buahbuahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan. - Perusahaan Hortikultura untuk menyediakan</p>	<p>Dinas Pertanian (Direktorat Jenderal Hortikultura, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin); Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); Perguruan Tinggi</p>
<p><b>- PENGEMBANGAN DATA HORTIKULTURA POTENSI DENGAN MENGGUNAKAN FRAME ST2013 PER KOMODITAS PER RUMAH TANGGA</b> Tersedianya data produksi dengan menggunakan frame hasil ST2013 yang lengkap dan akurat dan memperoleh berbagai informasi tentang populasi rumah tangga hortikultura potensi</p>	<p>a. mendapatkan keterangan tentang luas panen dan produksi. b. Memapatkan informasi luas panen berdasarkan metode wawancara c, Mendapatkan informasi pendukung terkait kegiatan usaha</p>	<p>Dinas Pertanian; Perguruan Tinggi; Masyarakat umum yang membutuhkan data hortikultura</p>
<p><b>- SURVEI PERUSAHAAN PERKEBUNAN</b> Memperoleh data komoditi perkebunan baik mengenai perkembangan produksi, struktur ongkos, hambatan yang ditemui maupun terhadap efisiensi pengelolaan kebun. Memperoleh Direktori perusahaan perkebunan yang mutakhir</p>	<p>Data yang dikumpulkan dalam survey tahunan dan triwulanan perusahaanperkebunan, meliputi nama dan alamat lengkap perusahaan , yaitu karet ,kopi, kakao , kelapa sawit, kina, teh, tebu dan tembakau. Data yangdikumpulkan dalam survey tahunan perusahaan perkebunan (strukturongkos perusahaan perkebunan) meliputi jenis tanaman yang dibudidayakan, penguasaan dan penggunaan lahan, produksi, struktur ongkos komoditi utama, tenaga kerja dan struktur pendapatan. Updating direktori perusahaan perkebunan dimaksudkan untuk memperoleh daftar nama dan alamat perusahaan perkebunan secara lengkap, akurat dan mutakhir serta memperoleh informasi jenis tanaman yang diusahakan dan luas tanaman.</p>	<p>Bappeda RI; Dinas Pertanian; Peneliti; Mahasiswa; Masyarakat Umum</p>
<p><b>- IMPLEMENTASI PENGUMPULAN DATA KOMODITAS PERTANIAN STRATEGIS MELALUI RUMAH TANGGA</b> 1. Mendapatkan data statistik Pertanian Hortikultura dan perkebunan yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran struktur pertanian untuk komoditas strategis yang jelas di Indonesia, 2. Memperoleh berbagai informasi tentang populasi rumah tangga pertanian usaha komoditas strategis hortikultura dan perkebunan, jumlah pohon dan sebagainya.</p>	<p>1. Tersedianya data statistik Pertanian Hortikultura dan perkebunan yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran struktur pertanian untuk komoditas strategis yang jelas di Indonesia, 2. Tersedianya berbagai informasi tentang populasi rumah tangga pertanian usaha komoditas strategis hortikultura dan perkebunan, jumlah pohon dan sebagainya.</p>	<p>Dinas Pertanian; Perguruan Tinggi; Masyarakat umum yang membutuhkan data pertanian;</p>
<p><b>2909 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN</b></p>		
<p><b>- SURVEI PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN RPH/TPH</b> Menyediakan data peternakan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam bidang peternakan, baik daging, telur, maupun susu.</p>	<p>- untuk mendapatkan data struktur ongkos, produksi, pengolahan dan pemasaran, serta nilai tambah yang dapat digunakan dalam penghitungan PDB. - untuk mendapatkan jumlah ternak yang dipotong dan produksi daging yang dapat digunakan dalam penghitungan PDB.</p>	<p>Dinas Pertanian; Pelaku Usaha Peternakan (Perusahaan); Perguruan Tinggi</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI PERUSAHAAN PERIKANAN, TPI/PPI/PP</b> Melalui survei ini diharapkan dapat terbentuk direktori lengkap Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pelabuhan perikanan (PP)/pangkalan pendaratan ikan (PPI) di seluruh Indonesia, jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan penangkapan dan budidaya ikan sehingga data yang dihasilkan dapat berguna bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di sektor perikanan. - Merupakan salah satu upaya untuk memperluas/mengembangkan, dan mempertajam data statistik dibidang perikanan yang telah ada dan melengkapi informasi lain, sehingga diperoleh data yang lebih rinci, lengkap, akurat, relevan dan up to date.</p>	<p>Pengumpulan data melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pelabuhan Perikanan (PP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) bertujuan untuk mendapatkan jumlah direktori TPI/PP/PPI, sistem penjualan ikan secara lelang/tidak lelang, jumlah perahu/kapal yang mendarat, dan besarnya produksi/nilai produksi ikan yang dijual melalui TPI/PP/PPI. - Pengumpulan data perusahaan budidaya/penangkapan ikan bertujuan untuk mendapatkan jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan budidaya/penangkapan ikan, Banyaknya produksi, pengeluaran produksi, pembentukan barang modal, dan banyaknya tenaga kerja.</p>	<p>Perpustakaan daerah; Kepala Arsip Daerah</p>
<p><b>- SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN</b> Dengan tersedianya data yang lengkap dan akurat, yang dapat diperoleh dari survei perusahaan kehutanan, dapat disusun perencanaan dan kebijakan yang lebih terarah, sehingga diharapkan produksi hasil hutan terus meningkat tetapi kelestarian hutan tetap terjaga.</p>	<p>Mendapatkan data statistik yang lengkap dan akurat di subsektor kehutanan. Apabila tak ada data yang baik dan tepat waktu, maka rencana dan pengambil keputusan akan mengambil keputusan tanpa menggunakan dasar yang kuat, sehingga keputusan yang diambil bisa salah dan menimbulkan kekeliruan yang fatal.</p>	<p>Direktorat Bina rencana Pemanfaatan Hutan tanaman Dirjen BPK, Kemehut; Direktorat Bina rencana Pemanfaatan Hutan Produksi Dirjen BPK, Kemehut; Direktorat Jendral Planologi Kehutanan, Kemenhut; Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan Badan Planologi, Kemenhut; Direktorat Perlindungan Hutan dan konservasi alam, Kemenhut; Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut; Perguruan tinggi</p>
<p><b>2904 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI</b></p>		
<p><b>- SURVEI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG BULANAN</b>  Pemerintah mempunyai data yang dapat digunakan untuk tujuan pengambilan kebijakan</p>	<p>Memperoleh indeks produksi industri skala besar dan sedang bulanan dan triwulanan  Memperoleh indikator dini untuk melihat pertumbuhan sektor industri manufaktur Sebagai dasar acuan penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya di industri manufaktur  Memperoleh data industry manufaktur yang lengkap sebagai bahan pedoman pembuatan kebijakan</p>	<p>1. Dinas Perindustrian; 2. Dinas Perdagangan; 3. Dinas Kelautan dan Perikanan; 4. Komisi Persaingan dan Perlindungan Usaha; 5. BKPM; 6. Kementerian ESDM; 7. Perguruan Tinggi; 8. Bank Indonesia</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI INDUSTRI BESAR/SEDANG TAHUNAN</b> Pemerintah mempunyai data yang dapat digunakan untuk tujuan pengambilan kebijakan</p>	<p>Memperoleh data industry manufaktur yang lengkap sebagai bahan pedoman pembuatan kebijakan</p>	<p>Dinas Perindustrian; Dinas Perdagangan; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan dan Perikanan; Komisi Persaingan dan Perlindungan Usaha; BKPM; Kementerian ESDM; Perguruan Tinggi; Bank Indonesia; Swasta</p>
<p><b>- SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (VIMK) TRIWULANAN</b> Mendapatkan informasi keberadaan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil di Indonesia secara kontinyu</p>	<p>Mengetahui perkembangan sektor industri mikro dan kecil secara umum dengan referensi waktu triwulanan.</p>	<p>1. Bank Indonesia ; 2. Dinas Perindustrian; 3. Dinas Perdagangan ; 4. Dinas Pertanian; 5. Kementerian Koperasi dan UKM; 6. Lembaga riset dan penelitian UKM; 7. Perguruan Tinggi</p>
<p><b>- SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI</b></p>	<p>- Mendapatkan direktori perusahaan pertambangan, energi dan penggalian yang up to date. - Mendapatkan data penyerapan tenaga kerja di masing-masing sub sektor pertambangan, energi dan penggalian. - Mendapatkan struktur biaya perusahaan secara umum</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>
<p><b>- SURVEI KONSTRUKSI</b> - Mendapatkan data mengenai jumlah perusahaan konstruksi yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia serta peranannya dalam pembangunan. - Mendapatkan data mengenai penyebaran tenaga kerja, upah/gaji, struktur permodalan, pemakaian bahan, san struktur</p>	<p>Mendapatkan data (informasi) yang akurat, rinci dan mutakhir dari sektor konstruksi secara berkala, sehingga dapat memberikan informasi perkembangan yang dicapai serta kekurangan-kekurangannya.</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Perum Perumnas; Badan Kordinasi Penanaman Modal; Bank Indonesia; Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN); Asosiasi Semen Indonesia (ASI); Asosiasi-Asosiasi Konstruksi; Real Estate Indonesia (REI); Perguruan Tinggi;</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>2902 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK DISTRIBUSI</b>  <b>- KOMPILASI DATA STATISTIK EKSPOR</b>            Untuk menghasilkan data ekspor yang tepat waktu, akurat, dan terpercaya.            Karena data statistik ekspor merupakan salah satu indikator ekonomi nasional bagi pemerintah dan indikator perdagangan bagi dunia usaha.</p>	<p>- Untuk menghasilkan data ekspor setiap bulan yang dirinci menurut komoditi, negara tujuan, dan pelabuhan muat, baik volume maupun nilai.            - Untuk menghasilkan angka sementara, angka ekspor bulanan untuk dilaporkan dalam Pers Release dan Sidang Menko Perekonomian</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;            Dinas Perdagangan</p>
<p><b>- PENDATAAN EKSPOR DI LUAR DOKUMEN BEA CUKAI</b>            Pendataan ekspor di luar catatan Bea Cukai diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja ekspor. Hal ini dapat digunakan juga sebagai bahan penyempurnaan penghitungan PDB Indonesia maupun PDRB Provinsi/Kabupaten.</p>	<p>Memperoleh angka ekspor diluar catatan Bea Cukai selama 1 tahun</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;            Kemendag</p>
<p><b>- PEMBUATAN DATABASE EKSPORTIR DAN PEMBELI LUAR NEGERI</b>            Menentukan Metodologi Survei Ekspor Jasa yang feasible rekomendasi UNSD dalam (Manual Statistic of International Trade Services) MSITS</p>	<p>Mendapatkan Metodologi Survei ekspor jasa yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.</p>	<p>Dinas Perdagangan;            Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif;            Dinas Perindustrian;</p>
<p><b>- SURVEI IMPOR DAERAH PERBATASAN</b>            Memperbaiki dan menyempurnakan ruang lingkup dan metode pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data impor</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas, memperbaiki, dan melengkapi data statistik Perdagangan luar negeri Indonesia.            2. Menyajikan data yang menggambarkan karakteristik perdagangan di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Timor Leste dan Papua New guinea baik perbatasan darat maupun laut.</p>	<p>Dinas Perdagangan;            Bank Indonesia;            Bea dan Cukai;            Imigrasi</p>
<p><b>- KOMPILASI DATA STATISTIK IMPOR</b>            Untuk menghasilkan data impor yang tepat waktu, akurat dan terpercaya.            Karena data statistik impor merupakan data yang banyak ditunggu oleh pengguna data dan merupakan salah satu indikator ekonomi nasional bagi pemerintah dan indikator perdagangan bagi dunia usaha.</p>	<p>1. Memperbaiki dan menyempurnakan ruang lingkup dan metode pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data impor,            2. Menyusun dan menyajikan data impor menurut jenis barang (HS dan SITC), negara asal, pelabuhan bongkar dan golongan penggunaan barang,</p>	<p>Dinas Perdagangan;            Kementerian Perindustrian;            Kementerian Pertanian;            Kementerian Kehutanan;            UN Comtrade;            IMF;            Pihak Swasta;            Akademika/Mahasiswa</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA TERINTEGRASI</b></p> <p>Memenuhi kebutuhan indikator maupun perkembangan usaha secara triwulanan pada kegiatan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor</li> <li>2. Transportasi dan pergudangan</li> <li>3. Lembaga keuangan bukan bank (untuk KBLI tertentu)</li> <li>4. Jasa informasi (untuk KBLI tertentu)</li> <li>5. Kegiatan keuangan Pemerintah Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan data tentang indeks nilai produksi/pendapatan/output perusahaan/usaha pada sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, informasi, serta sektor keuangan yang berkesinambungan (triwulanan)</li> <li>2. Memberikan gambaran tentang perkembangan perusahaan/usaha untuk mendukung penyusunan PDB dan PDRB Triwulanan</li> <li>3. Memperoleh informasi terkini dan tercepat dalam bentuk data kuantitas mengenai indikator produksi triwulanan dan data kualitas sebagai pendukung data kuantitas</li> </ol>	<p>Dinas Perdagangan; Dinas Pertanian; Dinas Koperasi dan UKM; Bappeda; Peneliti; Perguruan Tinggi; Masyarakat Pengguna Data</p>
<p><b>- SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI</b></p> <p>Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu barang mulai dari produsen hingga konsumen. Rantai ini mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat, karena selain merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen juga dapat memberikan nilai tambah pada pelakunya. Sementara itu, pola distribusi barang kebutuhan masyarakat saat ini diduga masih bermasalah. Hal ini terlihat dari melambungnya harga barang kebutuhan masyarakat, serta kelangkaan barang tersebut di beberapa daerah.</p> <p>Selain itu, rasa kepuasan yang belum merata antara produsen, lembaga lembaga usaha perdagangan (dalam tata niaga) dan konsumen juga menjadi masalah dalam distribusi barang. Untuk mengetahui dimana letak permasalahan tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan Pola Penjualan Produksi.</li> <li>b. Mendapatkan Pola Distribusi Perdagangan.</li> <li>c. Mendapatkan Peta Wilayah Penjualan Produksi.</li> <li>d. Mendapatkan Peta Wilayah Distribusi Perdagangan.</li> <li>e. Memperoleh data tentang margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.</li> </ol>	<p>Dinas Perdagangan; Dinas Perindustrian; Dinas Kelautan; Asosiasi-asosiasi perdagangan yang berhubungan dengan komoditi terpilih; Para peneliti, akademisi, dan mahasiswa;</p>



Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYUSUNAN DIREKTORI PASAR DAN PUSAT PERDAGANGAN</b>  Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan, sektor keuangan, sektor perhubungan/transportasi dan telekomunikasi. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Kegiatan perdagangan lebih banyak dilakukan di pasar, oleh karena itu perlu disusun direktori pasar yang mutakhir sebagai kerangka sampel survey perdagangan.</p>	<p>a. Mendapatkan daftar nama dan alamat pasar/sentra perdagangan di seluruh Indonesia  b. Mendapatkan jumlah perusahaan/usaha perdagangan yang berada di pasar/sentra perdagangan  c. Mendapatkan jumlah pasar menurut jenisnya  d. Mendapatkan kerangka sampel perdagangan</p>	<p>1. Dinas Perdagangan;  2. Direktorat Bina Pasar;  3. Asosiasi terkait</p>
<p><b>- STUDI INVENTARISASI SUMBER INFORMASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN STATISTIK PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH</b>  Untuk menginventarisir sumber informasi sehingga memperoleh data indikator perdagangan antar wilayah (provinsi) pada sektor perdagangan yang diteliti secara lengkap dan berkesinambungan untuk mendukung penghitungan PDB/PDRB.</p>	<p>1. Menyediakan data tentang nilai produksi/pendapatan/output perusahaan/usaha pada sektor perdagangan, ekspor impor antar wilayah/provinsi yang berkesinambungan.  2. Memberikan gambaran tentang perkembangan perusahaan/usaha untuk mendukung penyusunan PDB dan PDRB.  3. Memperoleh informasi terkini dalam bentuk data kuantitas mengenai indikator produksi dan data kualitas sebagai pendukung data kuantitas.</p>	<p>Dinas Perdagangan;  Dinas Perhubungan;  Bank Indonesia;  Asosiasi terkait</p>
<p><b>- SURVEI WAKTU TUNGGU (DWELLING TIME) DI PELABUHAN</b>  BPS melalui Subdit Stat Transportasi melakukan penghitungan dwelling time secara periodik di pelabuhan dalam rangka mendukung dashboard dwelling time nasional.</p>	<p>Menyediakan data dwelling time impor/ekspor dan dwelling time domestik(antar pulau) secara periodik.</p>	<p>Pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan pemerintah; Dunia usaha</p>
<p><b>- KOMPILASI DATA TRANSPORTASI</b>  sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang transportasi, baik di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun nasional.</p>	<p>Menyediakan data angkutan darat, laut dan udara secara periodik dan berkesinambungan dalam (i) Berita Resmi Statistik (BRS) dan Buletin Statistik Bulanan Indikator Ekonomi yang disajikan bulanan, (ii) Publikasi Statistik Perhubungan dan Publikasi Statistik Indonesia yang disajikan tahunan, maupun (iii) penyajian dalam bentuk lainnya, seperti penyajian dalam website.</p>	<p>Pemerintah Daerah;  Masyarakat pengguna data</p>
<p><b>- SURVEI ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI TERMINAL DAN JEMBATAN TIMBANG</b>  Mengetahui pergerakan penumpang dan barang di Indonesia melalui terminal dan jembatan timbang.</p>	<p>Mendapatkan data atau informasi mengenai arus penumpang dan barang angkutan jalan.</p>	<p>Para Instansi terkait angkutan jalan;  Para pengguna jalan;  Dunia usaha</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PUBLISITAS SE2016</b> Masyarakat luas dapat mengetahui urgensi ketersediaan data dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan keadaan terkini sehingga tumbuh kesadaran untuk berpartisipasi aktif dan mendukung kelancaran pelaksanaannya. Data yang dihasilkan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang dilakukan sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>memberikan penjelasan secara rinci tentang kegiatan SE2016 serta pemanfaatan statistik ekonomi yang dihasilkan bagi semua kalangan, baik para pelaku ekonomi, pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas</p>	<p>Pemerintah; Swasta; Masyarakat Luas</p>
<p><b>- LISTING USAHA/PERUSAHAAN</b> 1. Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan kuesioner, organisasi lapangan dan metodologi yang telah direvisi berdasarkan hasil Uji Coba/Gladi Kotor Listing Sensus Ekonomi 2016 2. Mendeteksi dini permasalahan untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016</p>	<p>1. Uji cobakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang merupakan penyempurnaan dari hasil Uji Coba/Gladi Kotor Listing 2. Metodologi pencacahan baik listing maupun sampel 3. Meneliti tingkat keakuratan hasil pelaksanaan lapangan dan melihat efektifitas petugas</p>	<p>pemerintah; pengusaha/swasta; masyarakat</p>
<p><b>- GLADI BERSIH PENCACAHAN UMK DAN UMB SENSUS EKONOMI 2016</b> 1. Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan kuesioner, organisasi lapangan dan metodologi yang telah direvisi berdasarkan hasil Uji Coba/Gladi Kotor Pencacahan UMK dan UMB Sensus Ekonomi 2016 2. Mendeteksi dini permasalahan untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016</p>	<p>1. Uji cobakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang merupakan penyempurnaan dari hasil Uji Coba/Gladi Kotor Pencacahan UMK dan UMB 2. Meneliti tingkat keakuratan hasil pelaksanaan lapangan dan melihat efektifitas petugas</p>	<p>Dinas Perindustrian; Dinas Perdagangan; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi</p>
<p><b>2903 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK HARGA</b></p>		
<p><b>- SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN</b> Memperoleh data guna penghitungan Indeks Harga Produsen (IHP) atau Producer Price Index (PPI)</p>	<p>Mendapatkan data harga di tingkat produsen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.</p>	<p>Dinas Pertanian; Bappeda; Dinas Perindustrian; Dinas Perdagangan; Bulog; Bank Indonesia; Lembaga konsultan/penasihat keuangan; Pengusaha/Kontraktor/Rekanan Supplier; Perguruan Tinggi; Asosiasi</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI</b></p>	<p>Mendapatkan harga masing-masing bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi sebagai dasar penghitungan Indeks Kemalan Konstruksi kabupaten/kota dan provinsi.</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kanwil Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah Tk 1 dan Tk 2; Mahasiswa; Peneliti; Konsultan;</p>
<p><b>- SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR</b></p> <p>Menyajikan data berupa indikator harga yang secara bulanan dimuat dalam Indikator Ekonomi yang diterbitkan oleh BPS. Di samping itu juga diterbitkan publikasi seri tahunan untuk Indeks Harga Perdagangan Besar. Penghitungan Indeks Harga Perdagangan Besar tingkat Provinsi juga akan dilakukan untuk menunjang penghitungan PDRB dan keperluan statistik lainnya yang dimulai dengan studi diagram timbangnya pada tahun 2015.</p>	<p>Mendapatkan data harga perdagangan besar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan indeks harga dan indikator harga lainnya, guna memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional maupun wilayah.</p>	<p>Bank Indonesia; Badan Pemeriksa Keuangan; Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Komisi Pengawasan Persaingan Usaha; Instansi Pemerintah Lainnya; Pengusaha kontraktor; Peneliti dan mahasiswa;</p>
<p><b>- STUDI PENGEMBANGAN KUALITAS DATA IK</b></p> <p>Memberikan gambaran yang jelas terhadap keterbatasan survei IKK yang selama ini dilakukan. Survei ini merupakan studi mendalam terhadap data harga yang dianggap ekstrim. Selain itu, survei ini juga meneliti tentang diagram timbang IKK untuk menentukan diagram timbang yang paling optimal yang dapat mengakomodir keragaman konstruksi di Indonesia.</p>	<p>a. Melakukan evaluasi data harga barang konstruksi yang digunakan untuk penghitungan IKK. b. Melakukan pengecekan lapangan untuk harga-harga barang yang dianggap tidak wajar (ekstrim). c. Melakukan evaluasi data BoQ yang digunakan sebagai bobot IKK dan mengkaji bobot yang paling mewakili dalam penghitungan IKK. d. Mengkaji metode CPD yang digunakan untuk penghitungan IKK.</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kanwil Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah Tk 1 dan Tk 2; Mahasiswa; Peneliti; Konsultan;</p>
<p><b>- SURVEI PENYUSUNAN DIAGRAM TIMBANG IHPB PROVINSI</b></p> <p>Mendapatkan diagram timbang IHPB murni dari data primer.</p>	<p>a. Mendapatkan diagram timbang IHPB Subnasional di 32 provinsi b. Mendapatkan diagram timbang IHPB Nasional c. Mendapatkan sampel untuk IHPB Nasional dan Subnasional</p>	<p>Bank Indonesia; Badan Pemeriksa Keuangan; Komisi Pengawasan Persaingan Usaha; Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Instansi Pemerintah Lainnya; Pengusaha kontraktor; Peneliti dan mahasiswa</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI HARGA KONSUMEN DAN SURVEI VOLUME PENJUALAN ECERAN BERAS</b></p> <p>Mmemperoleh gambaran perkembangan harga eceran barang dan jasa dari waktu ke waktu serta pergeseran dan perubahan kualitas-kualitas yang diminati masyarakat dari setiap barang dan jasa tersebut</p>	<p>1. Data harga eceran barang dan jasa secara harian, mingguan, dwimingguan, dan bulanan</p> <p>2. Data bobot kualitas komoditas beras, bensin, solar, bahan bakar rumah tangga, tarif tenaga listrik, uang sekolah, tarif sewa dan kontrak rumah, serta komoditas spesifik lainnya</p> <p>3. Data perubahan harga eceran bahan pokok</p> <p>4. Indikator IHK dan Tingkat Inflasi/Deflasi</p>	<p>Kementerian Perencanaan Pembangunan Daerah;          Kanwil Keuangan;          Dinas Pertanian;          Dinas Perdagangan;          Dinas Perindustrian;          Dinas Ketenagakerjaan;          Dinas Kelautan dan Perikanan;          Perum BULOG;          Bank Indonesia</p>
<p><b>- UJI COBA SBH2017</b></p> <p>Menangkap informasi perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai dampak perubahan kondisi sosial dan ekonomi.</p>	<p>Memperoleh paket komoditas, diagram timbang, dan nilai konsumsi tahun dasar terkini sebagai data pokok perhitungan IHK.</p>	<p>Kementerian Perencanaan Pembangunan Daerah;          Kanwil Keuangan;          Dinas Pertanian;          Dinas Perdagangan;          Dinas Perindustrian;          Dinas Ketenagakerjaan;          Dinas Kelautan dan Perikanan;          Perum BULOG;          Bank Indonesia</p>
<p><b>- SURVEI HARGA PERDESAAN</b></p> <p>Mendapatkan data harga produsen perdesaan (sektor pertanian) dan harga konsumen perdesaan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.</p>	<p>Memperoleh indeks harga dan indikator harga lainnya. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang perencanaan dan pengamatan dini pada pelaksanaan pembangunan perdesaan khususnya pertanian.</p> <p>Menghasilkan data berupa indikator harga yang secara bulanan dimuat dalam Berita Resmi Statistik (BRS), Indikator Ekonomi, dan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE). Disamping itu, juga diterbitkan publikasi seri tahunan baik untuk indeks harga maupun data harganya.</p>	<p>Dinas Pertanian;          Dinas Kelautan dan Perikanan;          Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten;          Bappeda;          Mahasiswa/peneliti</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- UJI COBA NTP2017</b> Menghitung Nilai Tukar Perusahaan Pertanian</p>	<p>a. Memperoleh nilai produksi dan jenis komoditas yang banyak dihasilkan perusahaan pertanian subsektor perikanan dan kehutanan beserta persentase marketed surplusnya. b. Memperoleh nilai konsumsi dan biaya produksi serta komoditas yang banyak di gunakan perusahaan, baik untuk keperluan perusahaan maupun digunakan dalam proses produksi. c. Menyusun struktur input untuk setiap komoditas serta rasio biaya produksi terhadap total produksi. d. Sebagai bahan untuk menyusun paket komoditas diagram timbang NTP Perusahaan.</p>	<p>Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten; Bappeda; Mahasiswa/peneliti</p>
<p><b>2908 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA</b></p>		
<p><b>- STATISTIK LEMBAGA KEUANGAN</b></p>		
<p>Untuk memperoleh informasi tentang: a. Karakteristik masing-masing kegiatan usaha sektor lembaga keuangan b. Transaksi usaha melalui laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi/laba setiap kegiatan lembaga keuangan.</p>	<p>- Mendapatkan struktur dan kegiatan usaha Lembaga Keuangan masing-masing jenis perusahaan. - Mendapatkan data mengenai transaksi finansial yang dilakukan oleh sub sektor Lembaga Keuangan. - Memperoleh data tentang produktivitas dan biaya-biaya yang diperlukan</p>	<p>Perguruan Tinggi</p>
<p><b>- SURVEI STATISTIK BADAN USAHA DAN PASAR MODAL</b></p>		
	<p>1) Menyusun direktori perusahaan BUMN dan BUMD. 2) Menyediakan data statistik keuangan BUMN dan BUMD. 3) Menyajikan gambaran tingkat efektifitas dan efisiensi perusahaan negara dan daerah dalam mengelola sumber yang ada. 4) Menyajikan agregasi indikator perusahaan. 5) Menyajikan kurs jual dan beli valuta asing di 33 provinsi 6) Menyajikan data statistik Pasar Modal</p>	<p>Perguruan Tinggi; Peneliti; Badan Usaha</p>
<p><b>- SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b></p>		
<p>1) Memberikan Gambaran tentang Kinerja Keuangan daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota di seluruh Indonesia 2) Memberikan Gambaran Umum tentang Kinerja Desa terhadap dana yang telah dialokasikan kepada desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pendapatan Asli Desanya</p>	<p>1) Mendapatkan indikator tentang efektifitas kinerja keuangan daerah, dan penggunaannya untuk belanja daerah 2) Mendapatkan data Aktifitas Pemerintahan Desa melalui Keuangan Desa</p>	<p>Kementrian Dalam Negeri; Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b></p> <p>(a) Diperlukan untuk bahan perencanaan pembangunan di pusat dan daerah.  (b) Bahan indikator dan informasi tentang perkembangan sarana TIK  (c) Memberikan gambaran yang lebih jelas dari kegiatan TIK  (d) Menjadi indikator dini dalam menentukan banyaknya perusahaan yang menggunakan sarana TIK (komputer, akses internet, transaksi atau pemesanan barang melalui internet, dan sebagainya)</p>	<p>Mendapatkan informasi tentang:</p> <p>(a) perusahaan yang menggunakan komputer,  (b) perusahaan yang menggunakan sarana TIK (wireless LAN, wirebased LAN, intranet dan ekstranet),  (c) perusahaan yang mengakses internet, pegawai/karyawan yang bekerja dengan menggunakan internet,  (d) perusahaan yang mempunyai website/home page.</p>	<p>Masyarakat pengguna data Statistik TIK;  Pemerintah;  Pelaku usaha;  APJI;  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>
<p><b>- SURVEI PERUSAHAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b></p> <p>1) Menyediakan data profil perusahaan informasi dan komunikasi secara periodik dan berkesinambungan dalam:  (a) publikasi statistik perusahaan informasi dan komunikasi dan publikasi statistik Indonesia yang disajikan tahunan, maupun,  (b) penyajian dalam bentuk lainnya, seperti penyajian dalam website.  2) Mendapatkan struktur pengeluaran dan pendapatan.</p>	<p>(1) mendapatkan informasi mengenai profil, indikator produksi, pendapatan dan biaya, dan tenaga kerja perusahaan penerbitan,  (2) mendapatkan informasi mengenai profil, indikator produksi, pendapatan dan biaya, dan tenaga kerja perusahaan penyiaran dan pemrograman,  (3) mendapatkan informasi mengenai profil, indikator produksi, pendapatan dan biaya, dan tenaga kerja perusahaan jasa multimedia khususnya perusahaan Internet Service Provider (ISP), warnet dan televisi (TV) berbayar,  (4) mendapatkan informasi mengenai profil, indikator produksi, pendapatan dan biaya, dan tenaga kerja perusahaan Bioskop.</p>	<p>Pelaku Usaha (Perusahaan di Sektor Informasi dan Komunikasi); Perguruan Tinggi;  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p>
<p><b>- SURVEI IPTEK DAN INOVASI</b></p> <p>Sebagai pendukung dari kajian yang telah dilakukan oleh beberapa Kementerian/ Lembaga lainnya di bidang TIK khususnya terkait dengan peran sektor TIK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, maka pilot study STI yang akan dilaksanakan oleh BPS diharapkan menjadi baseline dalam meningkatkan ketersediaan data STI untuk perumusan kebijakan nasional. Memperoleh gambaran yang jelas dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sektor pemerintahan dan industri pengolahan TIK. Data statistik STI ini sangat diperlukan untuk penyusunan indikator tentang perkembangan STI, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan baik di pusat maupun daerah, dan secara tidak langsung dapat digunakan untuk menganalisis peran TIK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional.</p>	<p>1. Mengetahui jumlah lembaga dan perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.  2. Mengetahui besaran nilai anggaran, asal anggaran, dan jenis pengeluaran penelitian dan pengembangan.  3. Mengetahui jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan.  4. Mengetahui keluaran dan kinerja yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan (contohnya jurnal yang diterbitkan baik nasional maupun internasional, paten yang dihasilkan, lisensi teknologi).</p>	<p>BPPT Kemenristek;  Perguruan Tinggi;  Pelaku Usaha;  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (ICT DEVELOPMENT INDEX)</b></p> <p>Memperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat pembangunan TIK diseluruh wilayah Indonesia. Data statistik Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) ini sangat diperlukan untuk penyusunan indikator tentang perkembangan TIK di setiap provinsi/wilayah, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan baik di pusat, maupun di daerah. Selain itu, secara tidak langsung dapat digunakan untuk menganalisis peran TIK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan regional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur tingkat pembangunan TIK di suatu negara/wilayah menggunakan suatu ukuran yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarnegara/wilayah.</li> <li>2. Mengukur pertumbuhan pembangunan TIK di seluruh negara/wilayah.</li> <li>3. Mengukur gap digital, yaitu perbedaan antarnegara/wilayah dengan berbagai tingkat pembangunan TIK.</li> <li>4. Mengukur potensi pembangunan TIK atau pengembangannya, untuk mendorong pertumbuhan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia.</li> </ol>	<p>Kemenkominfo; International Telecommunication Union (ITU); Pelaku usaha; Pemerintah daerah;</p>
<p><b>- SURVEI BIDANG JASA PARIWISATA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) adalah untuk mengumpulkan data : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat penghunian kamar hotel, bulanan</li> <li>b. Banyaknya kamar terjual/terpakai, bulanan</li> <li>c. Lama tamu menginap/bermalam, bulanan</li> </ol> </li> <li>2. Survei Usaha Hotel dan Akomodasi adalah untuk mengumpulkan data : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertumbuhan jumlah hotel, tahunan</li> <li>b. Jumlah tenaga kerja usaha akomodasi tahunan</li> <li>c. Jumlah kamar dan tempat tidur usaha akomodasi, tahunan</li> </ol> </li> <li>3. Tujuan pengumpulan data Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara adalah untuk mengumpulkan data : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Banyaknya penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri</li> <li>b. Banyaknya penduduk pelintas batas</li> <li>c. Banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia</li> <li>d. Banyaknya warga negara asing yang tinggal di Indonesia</li> </ol> <p>Sasaran utama pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh data jumlah wisman yang datang ke Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri di 103 pintu masuk (UPT imigrasi) yang telah ditetapkan oleh Ditjen. Imigrasi. Penyajian data dilakukan secara tahunan dan dirinci menurut berbagai karakteristik, seperti kebangsaan dan jenis visa.</p> </li> <li>4. Survei Restoran/Rumah Makan adalah untuk mengumpulkan data: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertumbuhan jumlah usaha restoran/rumah makan, tahunan</li> <li>b. Jumlah tenaga kerja usaha restoran/rumah makan, tahunan</li> <li>c. Banyaknya tamu yang datang, tahunan</li> </ol> </li> <li>5. Tujuan Survei Statistik SPA adalah untuk mengumpulkan data : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Banyaknya usaha SPA</li> <li>b. Banyaknya pengunjung</li> <li>c. Pertumbuhan jumlah usaha SPA dll</li> </ol> </li> </ol>	<p>Dinas Pariwisata Kantor Imigrasi Perpustakaan Daerah Lembaga Asosiasi (ASITA, dll); ASEAN Sekretariat; Bank Indonesia (BI); Lembaga Masyarakat; Pemerintah Daerah; Perguruan Tinggi; Perhimpunan Hotel Republik Indonesia (PHRI); Lembaga Masyarakat; Pengusaha</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI KONSUMSI BAHAN POKOK</b> Memperkirakan volume dan tingkat konsumsi bahan pokok yang terdiri dari: beras, gula pasir, daging sapi, bawang merah, cabe, yang diolah di dalam rumahtangga di seluruh provinsi di Indonesia.</p> <p>Memperkirakan volume dan tingkat konsumsi bahan pokok yang diolah di luar rumahtangga baik yang berasal dari jasa penyedia makan dan minum, hotel, industri dan institusi lain yang terdiri dari: jasa kesehatan, jasa angkutan laut, jasa lainnya pengguna bahan pokok di seluruh provinsi di Indonesia</p>	<p>- Memperkirakan volume dan tingkat konsumsi bahan pokok yang terdiri dari: beras, gula pasir, daging sapi, cabai merah, bawang merah, yang diolah di dalam rumahtangga di seluruh provinsi di Indonesia.</p> <p>Memperkirakan volume dan tingkat konsumsi bahan pokok yang diolah di luar rumahtangga baik yang berasal dari jasa penyedia makan dan minum, hotel, industri dan institusi lain yang terdiri dari: jasa kesehatan, jasa angkutan laut, jasa lainnya pengguna bahan pokok di seluruh provinsi di Indonesia</p>	<p>Badan Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian; Lembaga Asosiasi; Bank Indonesia (BI); Perguruan Tinggi</p>
<p><b>- SURVEI PELINTAS BATAS PENDUDUK ASING PEMEGANG KITAS</b> Mengetahui karakteristik dan proporsi WNA pemegang KITAS yang tinggal sementara di Indonesia.</p>	<p>1. Mengetahui karakteristik pemegang KITAS yang masuk melalui Provinsi Banten, Bali, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Yogyakarta dan Kepulauan Riau</p> <p>2. Mendapatkan proporsi pemegang KITAS yang masuk melalui pintu masuk Sukarno Hatta, Ngurah Rai, Juanda, Sepinggan, Adi Sucipto, Tanjung Uban, Batam, namun hanya tinggal sementara di wilayah Indonesia sehingga dapat dikategorikan sebagai wisatawan mancanegara</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pariwisata; Kantor Imigrasi</p>
<p><b>2899 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK NERACA PRODUKSI</b></p>		
<p><b>-PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA BARANG TRIWULANAN 2010=100 (SKTNP BARANG)</b></p>		
<p>Menghitung/menghasilkan data Nilai Tambah menurut lapangan usaha khususnya barang triwulanan untuk skala nasional.</p>	<p>1) Ketersediaan indikator produksi barang sebagai data dasar yang mendukung penghitungan Nilai tambah lapangan usaha barang triwulanan. 2) Ketersediaan pola musiman (pola kegiatan) yang representatif bagi penyusunan dan penghitungan nilai tambah lapangan usaha barang triwulanan. 3) Penyiapan informasi kualitatif berkaitan dengan kecenderungan perubahan ekonomi sektoral. 4) Memperoleh informasi pendukung lainnya dalam rangka penyusunan PDB triwulanan.</p>	<p>instansi terkait</p>



Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- IMPLEMENTASI SEEA DALAM SISNERLING INDONESIA</b> Menyusun beberapa modul (account) SEEA yang dibutuhkan dalam rangka memahami keadaan sumberdaya pada saat ini dan memantau pemanfaatannya demi pembangunan berkelanjutan yang berwawaskan lingkungan.</p>	<p>Mengimplementasikan beberapa modul (account) SEEA dalam Sisnerling Indonesia, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya neraca aset penggunaan dan tutupan lahan.</li> <li>2. Tersedianya neraca aset fisik dan moneter hutan.</li> <li>3. Tersedianya neraca aset fisik dan moneter energi dan mineral.</li> <li>4. Tersedianya neraca arus (flow account) energi dan material.</li> <li>5. Tersedianya neraca arus produk pertanian, kehutanan, dan perikanan.</li> <li>6. Tersedianya neraca aktivitas lingkungan (EPEA, EGSS, dan pajak/subsidi lingkungan).</li> <li>7. Tersedianya neraca ekosistem keanekaragaman hayati (biodiversity).</li> <li>8. Tersedianya system terintegrasi neraca lingkungan dan ekonomi.</li> </ol>	<p>Bappeda sebagai data pendukung dalam perumusan RPJMD; Dinas/SKPD terkait sebagai data pendukung monitoring aspek lingkungan dan ekonomi; Kalangan akademis sebagai pihak yang berkepentingan dalam ranah akademis; Praktisi lingkungan, lembaga internasional yang bergerak memonitor bidang perlindungan lingkungan.</p>
<p><b>- PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN NERACA PRODUKSI LAPANGAN USAHA BARANG</b> Menghasilkan neraca produksi menurut lapangan usaha khususnya barang untuk skala nasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketersediaan neraca produksi menurut KBLI atau kelompok kegiatan sejenis untuk mendukung penghitungan SUT tahun 2014.</li> <li>2) Ketersediaan data yang lebih rinci baik dari sisi produksi maupun input antara serta input primer untuk memudahkan proses rekonsiliasi SUT tahun 2014.</li> <li>3) Memperoleh informasi pendukung lainnya dalam rangka penyusunan SUT maupun PDB level tahunan</li> </ol>	<p>Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan; Kalangan statistisi; Akademisi; Lembaga/Masyarakat umum serta institusi internasional yang berkepentingan mengamati perkembangan ekonomi khususnya lapangan usaha yang tercakup dalam neraca barang</p>
<p><b>- PENYUSUNAN PDB SEKTOR INFORMAL MENURUT LAPANGAN USAHA</b> 1) Mendapatkan data PDB sektor informal di Indonesia. 2) Mendapatkan data peranan sektor informal di masing-masing lapangan usaha. 3) Mendapatkan data produktivitas usaha sektor informal. 4) Mendapatkan profil usaha sektor informal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengetahui besaran PDB sektor informal.</li> <li>2) Mengetahui kontribusi sektor informal menurut lapangan usaha PDB.</li> <li>3) Mengetahui produktivitas usaha sektor informal.</li> <li>4) Mengetahui karakteristik usaha sektor informal.</li> </ol>	<p>Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan; Kalangan statistisi sebagai pihak yang berkepentingan menyusun data PDB sektor informal; Kalangan akademis yang berkepentingan terhadap data PDB sektor informal; Kalangan dunia usaha yang berkepentingan dalam kemajuan sektor informal di Indonesia.</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA JASA TRIWULANAN 2010=100 (SKTNP JASA)</b>            Memperoleh indikator produksi lapangan usaha jasa-jasa yang dapat dijadikan landasan bagi penghitungan PDB tahunan dan triwulanan khususnya lapangan usaha jasa-jasa.            Menyiapkan data dasar dan penyempurnaan rasio nilai tambah khususnya lapangan usaha jasa-jasa.</p>	<p>a. Ketersediaan indikator produksi lapangan usaha jasa-jasa sebagai data dasar yang mendukung penghitungan nilai tambah triwulanan lapangan usaha jasa-jasa.            b. Ketersediaan pola musiman (pola kegiatan) lapangan usaha jasa-jasa yang representatif bagi penyusunan dan penghitungan nilai tambah triwulanan lapangan usaha jasa-jasa.            c. Pemutakhiran data rasio nilai tambah lapangan usaha lapangan usaha jasa-jasa untuk menyusun PDB tahunan dan triwulanan Indonesia,            d. Penyiapan informasi kualitatif berkaitan dengan kecenderungan perubahan ekonomi lapangan usaha jasa-jasa,            e. Evaluasi penghitungan nilai tambah triwulanan lapangan usaha jasa-jasa.</p>	<p>1. Pemerintah Daerah;            2. Lembaga penelitian</p>
<p><b>- PENYUSUNAN MATRIKS TRADE AND TRANSPORT MARGIN (TTM) BERBASIS SNA 2008</b></p>	<p>Memperoleh informasi terbaru mengenai rasio margin perdagangan yang akan digunakan dalam penyusunan SUT dan Tabel I-O khususnya SUT tahun 2015-2019 dan Tabel IO tahun 2015. Tahun data yang digunakan adalah tahun 2015.            Selain mendapatkan rasio margin, survei ini juga bertujuan memperoleh informasi terbaru mengenai struktur tenaga kerja, indikator produksi maupun indikator harga, serta struktur pendapatan dan pengeluaran pada kegiatan industri perdagangan.</p>	<p>1. Pengambil Kebijakan            2. Peneliti            3. Mahasiswa, dll</p>
<p><b>- PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN NERACA PRODUKSI LAPANGAN USAHA JASA</b>            Penyusunan neraca produksi lapangan usaha jasa merupakan dasar penyempurnaan penyusunan PDB Indonesia dan tabel Supply dan Use (SUT), dimana SUT mampu mengintegrasikan proses penyusunan PDB Sektoral dan Penggunaan dari waktu ke waktu. Dengan penyusunan SUT memungkinkan dilakukannya uji konsistensi antara PDB Sektoral (Supply Side) dan PDB Penggunaan (Demand Side) baik melalui pendekatan komoditi maupun institusi. Implementasi SUT dalam penyusunan estimasi PDB Sektoral dan Penggunaan sejalan dengan rekomendasi PBB sebagaimana tercantum dalam panduan Sistem Neraca Nasional (System of National Accounts) 2008.</p>	<p>Memperoleh data yang rinci yang diperlukan dalam penyusunan neraca produksi lapangan usaha jasa sebagai dasar penyempurnaan penyusunan SUT. Sedangkan secara spesifik tujuannya adalah:            1. Memperoleh struktur input/biaya,            2. Mengetahui alokasi atau distribusi produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi,            3. Mendapatkan informasi mengenai struktur tenaga kerja,            4. Memperoleh indikator produksi atau harga,            5. Memperoleh informasi penunjang lainnya, untuk kegiatan sektor barang (pertanian, pertambangan dan sebagainya) dan sektor jasa (perdagangan, keuangan dan sebagainya),            6. Untuk penyempurnaan data dasar yang digunakan dalam penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan SUT Indonesia,            7. Mendukung kegiatan survey khusus neraca produksi (SKNP).</p>	<p>1. Seluruh kementerian/Lembaga Negara;            2. Peneliti</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYUSUNAN PDB INDONESIA TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA 2010=100</b></p> <p>-Meningkatkan konsistensi data nilai tambah lapangan usaha dan data dasar Subject matter dalam kurun waktu tiga bulan (triwulan)</p> <p>-Meningkatkan konsistensi antara PDB triwulanan Industri dan PDB triwulanan Pengeluaran</p> <p>-Memperoleh informasi pendukung lain</p>	<p>Menyusun Laporan dan menyajikan PDB Indonesia triwulanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Pemerintah Daerah Terkait;</li> <li>2. Bank Indonesia;</li> <li>3. Lembaga Pendidikan;</li> <li>4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);</li> <li>5. Dunia usaha/swasta;</li> <li>6. Akademisi</li> </ol>
<p><b>- PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN SUPPLY AND USE TABLE (SUT) DAN TABEL IO INDONESIA</b></p> <p>Dalam rangka mencapai target penyusunan PDB/PDRB tahun dasar 2010 yang berbasis System of National Account 2008 (SNA 2008) dan untuk memenuhi rekomendasi PBB maka perlu dilakukan penyusunan Supply and Use Table (SUT) Indonesia. Dengan tabel SUT ini juga dapat diturunkan hasilnya untu penyusunan Tabel Input-Output Indonesia</p>	<p>a. perencanaan ekonomi. Dengan alat tersebut dapan memberikan gambaran rinci tentang penyediaan barang dan jasa produksi dalam negeri dan impor dan penggunaan barang dan jasa untuk konsumsi antara dan konsumsi akhir akhir (konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, ekspor). Dengan membandingkan penyediaan dan penggunaan semua barang dan jasa pada level yang detail, inkonsistensi dapat ditemukan pada tingkat yang lebih agregat yang mungkin telah terjaring keluar. Dengan demikian, SUT memberikan konsistensi hasil pada level detail dan meningkatkan akurasi neraca nasional.</p> <p>b. SUT dapat digunakan sebagai alat konfrontasi data. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber yang tidak mengaplikasikan definisi, klasifikasi dan konsep yang sama. Sebagai contoh, data yang berasal dari survei establishment/ enterprise terkadang tidak konsisten dengan informasi yang didapatkan dari laporan pajak. SUT memungkinkan konfrontasi perbedaan tersebut secara efisien dan memberikan landasan yang kuat untuk membuat koreksi yang tepat. Konfrontasi data tersebut mengarah pada peningkatan akurasi estimasi.</p> <p>c. Untuk efisiensi dalam menggabungkan semua data dasar. Data yang digunakan dalam estimasi barang dan jasa yang dihasilkan, diperoleh dari berbagai jenis sumber statistik (survei establishment/enterprise, survei pengeluaran rumah tangga, statistic perdagangan, data dari kementerian dan statistic lainnya). SUT memungkinkan untuk menghubungkan data secara koheren antara lapangan usaha, produk dan pengguna utama secara sistematis.</p> <p>d. Untuk identifikasi kesenjangan data. SUT menyediakan kerangka kerja untuk memasukkan data pada output dan penggunaan dari semua sumber pada level rincian komoditi. Hal ini merupakan cara untuk mengidentifikasi area yang mana informasinya hilang. Misalnya dalam tabel penyediaan,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksekutif/Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Legislatif;</li> <li>3. Swasta;</li> <li>4. Akademisi;</li> <li>5. SKPD terkait</li> </ol>
<p><b>- PENYUSUNAN BACKCASTING PDB DAN STUDY PDB SEASONAL ADJUSTED</b></p> <p>Penyusunan studi PDB adjusted dimaksudkan untuk kepentingan analisis lebih lanjut dalam penyusunan model-model ekonomi pembangunan</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah terkait yang membutuhkan;</li> <li>2. Akademisi</li> </ol>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYUSUNAN PDB INDONESIA TAHUNAN, PENGEMBANGAN DAN KAJIAN IMPLEMENTASI SNA 2008</b>            Indepth Study Implementasi SNA 2008 dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas Indikator ekonomi yaitu PDB dan pertumbuhan ekonomi yang realistik dan dapat merefleksikan keadaan terkini serta sudah sesuai dengan konsep SNA 2008</p>	<p>Memberikan informasi terkini dan dapat dianalisis dengan keterbandingan Internasional</p>	<p>1. Seluruh Pemerintah Daerah Terkait;            2. Bank Indonesia;            3. Lembaga Pendidikan;            4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);            5. Dunia usaha/swasta;            6. Mahasiswa dan Organisasi Penelitian</p>
<p><b>- PERCEPATAN PENGHITUNGAN PDRB PERKAPITA UNTUK INDIKATOR DAU</b>            Untuk memenuhi kebutuhan penghitungan DAU tahun anggaran berikutnya pada Direktorat Dirjen Perimbangan Keuangan.</p>	<p>Menyediakan data PDRB Per Kapita menurut Kabupaten/Kota di Indonesia</p>	<p>1. Badan/Dinas di Daerah: (Bappeda, Pemda provinsi/kabupaten/kota);            2. Bank Indonesia;            3. Perguruan Tinggi</p>
<p><b>- PENYUSUNAN PDRB TAHUNAN DAN TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010=100</b>            Menyempurnakan dan menyeragamkan konsep dan metodologi serta survei khusus yang digunakan dalam penyusunan PDRB Lapangan Usaha berbasis SNA 2008. 2) Meningkatkan mutu data PDRB propinsi menurut lapangan usaha dengan hasil studi perbandingan antar sektor dalam kabupaten dan atau dalam propinsi, antar kabupaten/kota di tiap propinsi dan antar propinsi se-Indonesia dengan nasional.</p>	<p>1. Meningkatkan konsistensi data nilai tambah sektor lapangan usaha antara PDRB sektoral dan pengeluaran regional            2. melakukan kaderisasi sehingga output bisa diandalkan            3. Membandingkan dan menganalisa PDRB Regional dengan data PDB dan Tabel I-O nasional.            4. Memperoleh struktur input/biaya yang lebih rinci dan mengetahui alokasi atau distribusi produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi regional.            5. Penyempurnaan data dasar yang digunakan dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi dan kabupaten/kota</p>	<p>1. Badan/Dinas di Daerah (Bappeda,DPRD);            2. Perguruan Tinggi</p>
<p><b>2898 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN</b></p>		
<p><b>- PENYUSUNAN KOMPONEN PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT /IO SISI USES</b>            1) Memperoleh pola konsumsi rumahtangga dan LNPRT triwulanan.            2) Mengkoordinir data yang diperoleh dari sumber data sekunder bagi penyusunan neraca rumahtangga dan LNPRT.            3) Mengevaluasi pemanfaatan hasil SKTIR dan SKLNP, serta memperbaiki dan menyempurnakan metoda penelitian.            4) Menyusun dan menyajikan neraca rumahtangga dan LNPRT secara reguler.</p>	<p>Menunjang penyusunan Tabel Penyediaan dan Penggunaan (Supply and Use Table) dan Tabel Input-Output</p>	<p>1. Lembaga Legislatif;            2. Lembaga Eksekutif;            3. Satker di lingkungan BPS;            4. Lembaga Pemerintah lainnya (BI, Bank Komersial, BULOG, dan BAPPEDA);            5. Lembaga Internasional;            6. Lembaga Penelitian;            7. Lembaga Perguruan Tinggi;            8. Perorangan (Peneliti, wartawan, mahasiswa dll)</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYUSUNAN NERACA RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA (FSA)</b>            1) Memperbaiki dan menyempurnakan parameter dan komponen neraca rumah tangga dan LNPRT            2) Mengkoordinir data yang diperoleh dari sumber data sekunder bagi penyusunan neraca rumah tangga dan LNPRT            3) Mengevaluasi pemanfaatan hasil SKTIR dan SKLNP, serta memperbaiki dan menyempurnakan metode penelitian 4) Menyusun dan menyajikan neraca rumah tangga dan LNPRT secara reguler.</p>	<p>1) Memperbaiki dan menyempurnakan parameter dan komponen neraca rumah tangga dan LNPRT 2) Mengkoordinir data yang diperoleh dari sumber data sekunder bagi penyusunan neraca rumah tangga dan LNPRT 3) Mengevaluasi pemanfaatan hasil SKTIR dan SKLNP, serta memperbaiki dan menyempurnakan metode penelitian 4) Menyusun dan menyajikan neraca rumah tangga dan LNPRT secara reguler</p>	<p>1. Lembaga legislatif;            2. Lembaga Eksekutif;            3. Satker di Lingkungan BPS;            4. Lembaga pemerintahan lain (BI, Bank Komersial, BULOG dan Bappeda);            5. Lembaga penelitian;            6. Perguruan Tinggi;            7. Perorangan (peneliti, mahasiswa, wartawan dll)</p>
<p><b>- STUDI PENYUSUNAN NATIONAL TRANSFER ACCOUNTS (NTA)</b>            Melihat fenomena yang terjadi pada Aktivitas ekonomi kohor usia tertentu atau kelompok umur tertentu</p>	<p>Mengkalsifikasikan semua arus ke dalam kelompok usia yang bertujuan dalam penyediaan data dasar dalam Studi perekonomian</p>	<p>1. Lembaga legislatif;            2. Lembaga Eksekutif;            3. Satker di Lingkungan BPS;            4. Lembaga pemerintahan lain;            5. Lembaga peneliti;            6. Perguruan Tinggi;            7. Perorangan (peneliti, mahasiswa, wartawan dll)</p>
<p><b>- PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (FSA)</b>            Hasil penyusunan dan penghitungan masing-masing neraca tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan neraca institusi/ sektor pemerintah dan badan usaha/ korporasi non finansial dalam sistem neraca nasional Indonesia (SNNI) menurut konsep System of National Accounts (SNA) 2008, sistem neraca sosial ekonomi (SNSE), dan penyusunan neraca arus dana (NAD) pemerintah triwulanan dan tahunan serta NAD badan usaha (perusahaan pemerintah dan swasta) non finansial tahunan.</p>	<p>Penyusunan neraca sektor/institusi pemerintah dalam SNNI            Penyusunan neraca sektor/institusi BUMN/BUMD nonfinansial dalam SNNI            Penyusunan neraca sektor/institusi Badan Usaha Swasta nonfinansial dalam SNNI            Penyusunan Neraca Arus Dana (NAD)</p>	<p>1. Kanwil Keuangan;            2. Bappeda;            3. Bank Indonesia;            4. Pelaku Usaha (Perusahaan);            5. Perguruan Tinggi;</p>
<p><b>- PENYUSUNAN KOMPONEN PENGELUARAN PEMERINTAH TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT/IO SISI USES</b>            memperoleh pola konsumsi pemerintah triwulanan dan NTB pemerintah, meningkatkan kualitas data konsumsi pemerintah dan NTB pemerintah tahunan, memperbaiki kualitas data konsumsi serta menunjang penyusunan Tabel SUT dan Tabel Input-Output pada sisi uses.</p>	<p>- Penyusunan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan NTB untuk PDB triwulanan dan tahunan            - Penyusunan struktur input, NTB, pengeluaran konsumsi pemerintah untuk Supply and Use Table (SUT) dan tabel Input Output (I-O).</p>	<p>1. Kanwil Keuangan;            2. Bappeda;            3. Bank Indonesia;            4. Pelaku Usaha (Perusahaan);            5. Perguruan Tinggi</p>
<p><b>- PENYUSUNAN NERACA ARUS DANA DAN SEKTOR FINANSIAL (FSA)</b>            Penyusunan matrik NAD bertujuan untuk merangkum seluruh transaksi finansial dari seluruh institusi/pelaku ekonomi baik domestik maupun luar negeri.</p>	<p>1) Diperoleh neraca neraca capital dan finansial sektor korporasi finansial,            2) NAD Tahunan dan Triwulanan,            3) Informasi tentang struktur tabungan dan investasi menurut institusi,            4) Informasi mengenai Saving-Investment Gap menurut sektor,            5) Diketahui bagaimana perilaku sektor surplus menyalurkan dananya, dan bagaimana perilaku sektor defisit yang membutuhkan dana untuk melakukan investasi, 6) Diperoleh informasi finansial yang lengkap dan terpadu dalam bentuk sistem data makro yang berkaitan dengan arus penyediaan dan penggunaan dana antar institusi,</p>	<p>1. Bappeda;            2. Bank Indonesia;            3. Perusahaan swasta di bidang finansial;            4. Akademisi;            5. Peneliti;            6. Perpustakaan Daerah;</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYUSUNAN MATRIKS PMTB INSTITUSI PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengetahui nilai barang modal (PMTB) menurut jenis barang dan lapangan usaha berdasarkan konsep SNA 2008.</li> <li>2) Gambaran dan karakteristik mengenai produk neto (surplus usaha neto, nilai tambah neto) dari hasil suatu proses produksi.</li> <li>3) Gambaran tentang akumulasi kekayaan (wealth) yang diperoleh sebagai hasil dari proses pembangunan.</li> <li>4) Economic efficiency dan economic productivity dari kapital yang digunakan dalam proses produksi.</li> <li>5) PMTB menurut kelompok jenis barang dan lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan konstan.</li> <li>6) Memperoleh data usia pakai setiap jenis barang modal menurut sektor usaha.</li> <li>7) Memperoleh nilai penyusutan setiap jenis barang modal menurut sektor usaha.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia memanfaatkan informasi ini sebagai masukan terhadap kebijakan kredit investasi, cadangan devisa, serta gambaran perkembangan aset barang modal tetap yang dimiliki oleh tiap institusi;</li> <li>2. Kanwil Keuangan.</li> </ol>
<p><b>- PENYUSUNAN KOMPONEN EKSPOR/ IMPOR BARANG DAN JASA TRIWULANAN/ TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT/ IO SISI USES</b></p> <p>Penyusunan komponen ekspor/impur barang dan jasa ini dimaksudkan untuk menunjang ketersediaan data-data dalam komponen PDB penggunaan triwulanan/tahunan dan penyusunan SUT/IO</p>	<p>Dengan tersedianya data ekspor/impur barang dan jasa tersebut diharapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperoleh nilai dan struktur neraca barang dan jasa yang akurat yang untuk penyusunan PDB-E, SUT/IO Sisi Uses, dan neraca sektor institusi.</li> <li>2. Menyusun analisis singkat tentang transaksi barang dan jasa Indonesia.</li> <li>3. Menyelaraskan penghitungan ekspor/impur barang dan jasa di tingkat nasional (PDB) dan di tingkat provinsi (PDRB).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia;</li> <li>2. Kanwil Keuangan;</li> <li>3. Dinas Perdagangan;</li> <li>4. Dinas Pariwisata;</li> </ol>
<p><b>- PENYUSUNAN KOMPONEN PMTB DAN INVENTORI TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT /IO SISI USES</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengetahui gambaran dan karakteristik mengenai investasi yang berupa PMTB dan Perubahan Inventori Triwulanan dan Tahunan.</li> <li>2) Mengetahui nilai barang modal (PMTB) menurut jenis barang berdasarkan konsep baru SNA 2008 atas dasar harga berlaku dan konstan.</li> <li>3) Mengetahui nilai barang modal (PMTB) menurut asal barang atas dasar harga berlaku dan konstan.</li> <li>4) Mengetahui nilai posisi dan perubahan inventori menurut kelompok jenis barang atas dasar harga berlaku dan konstan.</li> <li>5) Mengetahui nilai posisi dan perubahan inventori menurut sektor lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan konstan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia memanfaatkan informasi ini sebagai masukan terhadap kebijakan kredit investasi, cadangan devisa, serta gambaran perkembangan aset barang modal tetap yang dimiliki oleh tiap institusi;</li> <li>2. Bappeda untuk keperluan perencanaan akselesari pembangunan</li> </ol>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYUSUNAN KONSOLIDASI PDB PENGELUARAN TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT /IO SISI USES</b></p> <p>1) Membangun Sistem Neraca Nasional melalui suatu proses konsolidasi agar data yang dihasilkan dapat terjaga kualitasnya.</p> <p>2) Meneliti perbedaan prosedur estimasi penyusunan statistik neraca nasional yang selama ini dilakukan terutama berkaitan dengan implementasi SNA 08.</p> <p>3) Meningkatkan kualitas sistem data yang sudah ada seperti halnya PDB dan Sistem Neraca Nasional (SNN), untuk mendukung analisis kinerja perekonomian nasional.</p> <p>4) Melakukan proses konsolidasi perangkat SNNI serta menurunkan data agregatnya sehingga dapat diperoleh informasi secara komprehensif, koheren dan konsisten.</p> <p>5) Menetapkan skala prioritas penyusunan neraca-neraca pokok sebagaimana yang direkomendasikan dalam SNA 08.</p> <p>6) Menyusun konsolidasi berbagai neraca institusi ke dalam format SNNI.</p> <p>7) Menginventarisasi serta mengumpulkan data yang tersedia pada berbagai sumber, untuk memenuhi kebutuhan penyusunan SNNI.</p> <p>8) Meningkatkan kemampuan teknis para pelaksana penyusunan SNNI khususnya kemampuan dalam menyusun statistik PDB menurut penggunaan, baik bagi staf BPS Pusat maupun instansi terkait.</p> <p>9) Menginventarisasi serta mengumpulkan data dasar yang tersedia pada berbagai sumber, untuk memenuhi kebutuhan penyusunan statistik PDB maupun neraca institusi.</p> <p>10) Monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan statistik PDB maupun statistik neraca institusi oleh BPS Pusat, dalam rangka penyesuaian dan pengembangan Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI) untuk berbagai kepentingan seperti perbandingan kinerja antar institusi dan keterkaitan berbagai neraca dalam kerangka neraca institusi</p> <p><b>- PENYUSUNAN KONSOLIDASI NERACA INSTITUSI (FSA)</b></p> <p>Memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada Indonesia sebagai anggota IMF dan juga negara G-20 dalam hal pemenuhan data indikator ekonomi makro terkini.</p> <p>Menyajikan informasi mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (sektor institusi) dalam bentuk kegiatan produksi, konsumsi, dan investasi yang dikemas dalam suatu sajian berupa neraca terintegrasi nasional.</p>		<p>1. Bappeda;</p> <p>1. Para pengambil kebijakan pada instansi terkait, 2. para peneliti, 3. pengamat ekonomi,</p>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYUSUNAN KONSOLIDASI PDRB PENGELUARAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN</b></p> <p>1) Membangun PDRB menurut penggunaan kabupaten/kota dan provinsi melalui suatu proses konsolidasi agar data yang dihasilkan dapat terjaga kualitasnya.</p> <p>2) Meningkatkan kualitas sistem data PDRB menurut penggunaan untuk mendukung analisis kinerja perekonomian regional dan nasional.</p> <p>3) Melakukan proses konsolidasi perangkat SNRI serta menurunkan data agregatnya sehingga dapat diperoleh informasi secara komprehensif, koheren dan konsisten. Menetapkan skala prioritas penyusunan neraca-neraca pokok regional sebagaimana yang direkomendasikan dalam SNA.</p> <p>4) Menyusun konsolidasi berbagai neraca institusi regional ke dalam format SNRI.</p> <p>5) Menginventarisasi serta mengumpulkan data yang tersedia pada berbagai sumber, untuk memenuhi kebutuhan penyusunan PDRB maupun neraca institusi regional.</p> <p>6) Menyiapkan dan mempublikasikan buku pedoman teknis operasional penyusunan PDRB dan neraca institusi regional.</p> <p>7) Meningkatkan kemampuan teknis para pelaksana penyusunan SNRI khususnya kemampuan dalam menyusun statistik PDRB menurut pengeluaran, baik bagi staf BPS Pusat maupun BPS daerah serta instansi terkait.</p> <p>8) Meneliti prosedur estimasi penyusunan statistik PDRB dan Pendapatan Regional yang selama ini dilakukan. Mengaplikasikan konsep-konsep terbaru yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi regional dan Indonesia.</p> <p>9) Menginventarisasi serta mengumpulkan data dasar yang tersedia pada berbagai sumber, untuk memenuhi kebutuhan penyusunan statistik PDRB maupun Pendapatan Regional.</p> <p>10) Monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan statistik PDRB maupun statistik Pendapatan Regional oleh BPS Pusat, dalam rangka penyesuaian dan pengembangan Sistem Neraca Regional Indonesia (SNRI) untuk berbagai kepentingan seperti perbandingan dan peringkat antar wilayah/region.</p>		<p>1. BAPPEDA; 2. Perguruan Tinggi</p>
<p><b>- PENYUSUNAN SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI (SNSE) INDONESIA</b></p> <p>1) Membangun sistem neraca sosial ekonomi Indonesia dalam suatu kerangka yang terpadu dan terintegrasi dalam bentuk Matriks.</p> <p>2) Dengan kerangka data tersebut maka gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi Indonesia dapat dianalisis dan di evaluasi lebih jauh.</p> <p>3) Memberikan gambaran kinerja sosial ekonomi Indonesia secara makro seperti kinerja perekonomian, distribusi pendapatan faktor-faktor produksi, distribusi pendapatan RT serta pola pengeluaran RT.</p> <p>4) Mengetahui keterkaitan berbagai pelaku ekonomi dan proses distribusi dan alokasi pendapatan pelaku-pelaku ekonomi Indonesia.</p> <p>5) SNSE dapat juga digunakan untuk menelusuri setiap kebijakan yang diambil dan pengaruhnya terhadap setiap segmen dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat.</p> <p>6) Meningkatkan kualitas sistem data yang sudah ada seperti halnya PDB sektoral, PDB Penggunaan, tabel Input-Output (I-O), neraca luar negeri dan data makro lainnya untuk mendukung analisis kinerja perekonomian nasional.</p>		<p>1. Bappeda;</p>



Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<b>2896 PENGEMBANGAN DAN ANALISIS STATISTIK</b>		
<b>- INDEKS TENDENSI BISNIS DAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN</b>		
Untuk menyusun dan menganalisis Sistem Pemantauan Indikator Dini melalui Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Mendatang.	Untuk menyusun dan menganalisis Sistem Pemantauan Indikator Dini melalui Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dunia Usaha;</li> <li>2. Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Peneliti/Perguruan Tinggi</li> </ol>
<b>- FORUM MASYARAKAT STATISTIK (FMS)</b>		
<p>a. memberikan saran dan pertimbangan dalam berbagai aspek di bidang statistik baik diminta maupun tidak diminta kepada Kepala Badan Pusat Statistik yang dapat diberikan secara berkala atau sewaktu-waktu,</p> <p>b. memberikan saran mengenai jenis statistik yang perlu dihasilkan untuk mendukung pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat,</p> <p>c. memberikan saran tentang penyempurnaan Sistem Statistik Nasional agar semakin andal, efektif, dan efisien,</p> <p>d. mengusulkan perbaikan, perluasan dan peningkatan koordinasi dalam penyelenggaraan statistik dan pembinaan statistik,</p> <p>e. memberikan evaluasi tentang mutu data yang dihasilkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik serta memberikan saran penyempurnaannya,</p> <p>f. memberikan masukan dan evaluasi tentang metodologi statistik, konsep, definisi dan klasifikasi yang digunakan dalam menghasilkan data statistik ekonomi, sosial dan statistik lainnya,</p> <p>g. memberikan evaluasi dan masukan-masukan mengenai makna data statistik yang dipublikasikan,</p> <p>h. memberikan saran tentang pelayanan statistik dan pemanfaatan statistik secara optimal,</p> <p>i. memberikan saran desiminasi data, baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik secara lebih efektif,</p> <p>j. menyusun laporan tahunan yang menyangkut segala hal yang dilaksanakan.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemerintah Daerah;</li> <li>2. pakar;</li> <li>3. praktisi;</li> <li>4. tokoh masyarakat</li> </ol>
<b>- PENGHITUNGAN IPM</b>		
Untuk menghitung angka IPM tahun 2015 pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi	Untuk menghitung angka IPM tahun 2015 pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda;</li> <li>3. Bank Indonesia;</li> <li>4. Dinas Sosial;</li> <li>5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</li> <li>6. Dinas Kesehatan;</li> <li>7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</li> <li>8. Pemerintah Daerah;</li> <li>9. Perguruan Tinggi;</li> <li>10. Masyarakat</li> </ol>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR STATISTIK LINTAS SEKTOR</b></p> <p>Penyempurnaan dan pengembangan indikator lintas sektor sangat penting untuk dapat memperbaiki indikator-indikator yang sudah ada dan memunculkan indikator baru yang diperlukan. Dengan disempurnakan dan dikembangkan indikator lintas sektor maka dapat mempertajam evaluasi terhadap kinerja pembangunan pemerintah yang bersifat lintas sektor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan indikator-indikator lintas sektor yang sudah ada</li> <li>2. Menyempurnakan indikator lintas sektor yang sudah ada yang perlu diperbaiki</li> <li>3. Mengembangkan indikator bersifat lintas sektor baru yang diperlukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa instansi luar BPS dalam negeri;</li> <li>2. Perpustakaan Daerah dan Beberapa Universitas.</li> </ol>
<p><b>- PENYUSUNAN STATISTIK INDONESIA</b></p> <p>Data dan informasi yang disediakan oleh BPS tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Bagi Pemerintah, data BPS dapat menjadi bahan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Bagi kalangan dunia usaha, dapat digunakan sebagai dasar pengembangan usaha, penentuan sumber pembiayaan, perkiraan produksi, perencanaan dan pengembangan pemasaran. Sedangkan bagi kalangan akademik dan masyarakat lainnya, menjadi bahan rujukan suatu penelitian atau perencanaan suatu kegiatan.</p>	<p>- Mengumpulkan data dari BPS dan instansi sektoral - Menyediakan data bidang perekonomian, sosial, dan lintas sektor di Indonesia secara series dan berguna bagi seluruh kalangan pengguna data</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa instansi luar BPS dalam negeri/SKPD/DPRD;</li> <li>2. Beberapa instansi luar BPS perwakilan asing;</li> <li>3. Perpustakaan Daerah dan Universitas</li> </ol>
<p><b>- PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR STATISTIK SOSIAL</b></p> <p>Pembangunan ekonomi yang terus mengalami perubahan akan membawa dampak terhadap taraf kesejahteraan rakyat (kesra) penduduk Indonesia. Jika pembangunan ekonomi meningkat diharapkan pada gilirannya taraf kesra juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Namun pengalaman menunjukkan bahwa harapan tidak selamanya terpenuhi sehingga perlu upaya untuk memonitor taraf kesra, yang merupakan sasaran akhir pembangunan ekonomi, secara berkala. Agar upaya ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien maka pemanfaatan sistem data basis yang handal sudah merupakan suatu keharusan. Selain itu, penyusunan Inkesra juga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai tingkat/keadaan kesejahteraan mereka secara obyektif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taraf dan Perkembangan kesra.</li> <li>2. Melihat perbedaan taraf kesra antar daerah dan karakteristik/kelompok penduduk lainnya.</li> <li>3. Memberikan gambaran besarnya/tingkat permasalahan kesra yang dihadapi.</li> <li>4. Mendeteksi sektor/bidang kesra yang memerlukan perhatian khusus.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa instansi luar BPS dalam negeri/SKPD/DPRD;</li> <li>2. Beberapa instansi luar BPS perwakilan asing;</li> <li>3. Perpustakaan Daerah dan Beberapa Universitas</li> </ol>
<p><b>- PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR STATISTIK EKONOMI</b></p> <p>Penyempurnaan dan pengembangan teknik laporan dan analisis statistik akan mampu menghasilkan laporan yang menyajikan perkembangan ekonomi Indonesia yang bisa digunakan pemerintah dan swasta sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan berbagai kebijakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas substansi, penampilan, cakupan dari berbagai indikator-indikator statistik khususnya mengenai bidang ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dan swasta.</li> <li>2. Mengembangkan variasi laporan dan teknik analisis, sesuai dengan kemajuan pembangunan ekonomi.</li> <li>3. Menyempurnakan isi laporan, terutama mengenai, - Kelengkapan variabel Kemutakhiran data - Evaluasi dan konsistensi data - Ketajaman analisis dan perluasan cakupan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa instansi luar BPS dalam negeri/SKPD/DPRD;</li> <li>2. Perpustakaan Daerah dan Beberapa Universitas</li> </ol>

Kegiatan/Aktifitas/Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENGEMBANGAN MODEL STATISTIK</b></p> <p>Pengembangan model statistik sangat penting untuk memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi di Indonesia sehingga dapat dirumuskan suatu kebijakan yang matang baik untuk periode saat ini maupun mendatang.</p>	<p>1) Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena sosial ekonomi di Indonesia.</p> <p>2) Melakukan simulasi terhadap model yang telah dibangun untuk melihat efektifitas kebijakan pembangunan yang di ambil di masa mendatang</p>	<p>Stakeholders</p>

**DATA MENCERDASKAN BANGSA**